



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGUSAHA DAN POLITIK :
KETERLIBATAN PENGUSAHA DALAM DUNIA POLITIK DI
SUMATERA BARAT 1999 - 2009**

SKRIPSI



**POPI SUPRIHANTO
05 181 010**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan khadirat Allah SWT, karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengusaha Dan Politik; “Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat Tahun 1999-2009”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Budaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, mulai dari tahap pemilihan judul, pengumpulan data, hingga penganalisaan data, penulis tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Syukur Alhamdulillah, berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, segala hambatan dan kendala tersebut dapat penulis atasi.

Melalui lembaran ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Drs. Syafrizal, M.Hum sebagai pembimbing I dan Israr Iskandar, S.S, M.Si sebagai pembimng II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan menuntun penulis dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada ketua Jurusan Sejarah Drs. Sabar, M.Hum dan sekretaris Jurusan Dra. Enimay, M.Si, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis.

Terimakasih kepada para Dosen yang mengajar di Jurusan Sejarah; Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan., Dr. Mhd. Nur, M.S., Drs. Nopriyasman, M.Hum., Drs. Zulqayyim, M.Hum., Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum., Hary Efendi Iskandar, S.S, M.A., Dr. Lindayanti, M.Hum., Dra. Midawati, M.Hum., Dra. Irianna., Drs.

Purwohusodo, M.Hum., Drs, Armansyah., Drs. Wannofri Samry, M.Hum., Drs. M. Djuir, Yenny Narny, S.S, M.A., dan Yudhi Andoni, S.S.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada; Suwirpen Suib, Zamhar Baheram, Syaharman Zanhar, Hidayat, S.S, Syukriadi Syukur, Djonimar Boer, Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si., Azis Ramlan, selaku informan dan bersedia memberikan data-data terkait penulisan skripsi ini..

Sujud takzim penulis kepada kedua orang tua Bapak Sutarso dan Ibu Siti Aliyah, terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta kesabaran dalam mendidik dan menghadapi tingkah laku penulis. Sebuah kado kecil ananda persembahkan sebagai sebuah bakti kepada kalian. Selanjutnya kepada kakak kandung, Kurniawati Aliasih beserta suaminya Sawaldi, S. Ag, hanya terimakasih atas segala kebaikan dan pengertian dari kalian. Adik kandung penulis, M. Destrianto, semoga Allah memberikan segala kemudahan bagi engkau. Untuk kedua keponakan penulis, Ananda Raudhatul Jannah dan M. Aziz, semoga menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua.

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat penulis, “Sejarah 05 Badunsanak”; Roni (Mamak), Ronal (Brimob), Deni (Raden), Arif (Toyib), Dinul, Arif (Komting), Frans (Toke), Tomi (Sasing), yang selalu menyuntikan semangat kepada penulis. Indah, Rika, Iren terima kasih atas kebersamaannya. Ana (Otong) dan Meri, terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis sehingga bisa berkeluh kesah, memberi

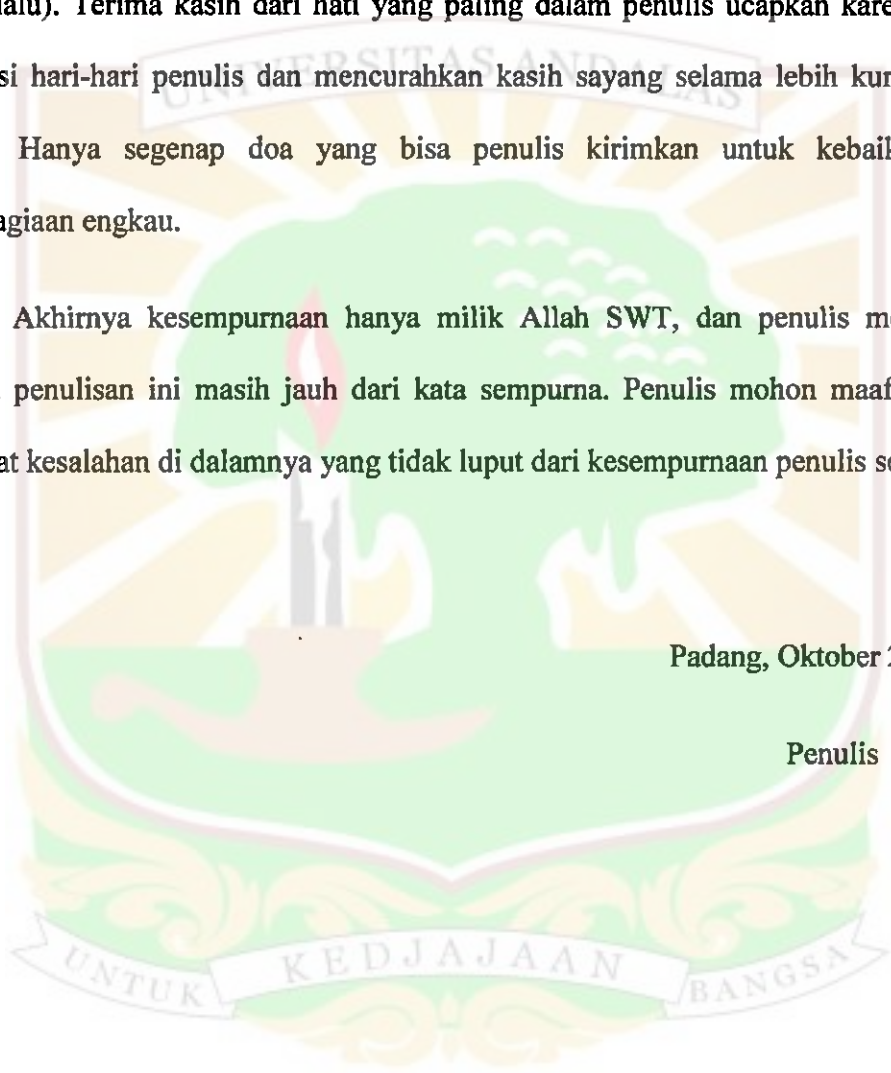
solusi atas masalah yang dihadapi. Terimakasih kawan, semoga persahabatan kita akan selalu abadi.

Untuk yang terindah dan teristimewa, Ditha Rahmasari (sebuah nama dari masa lalu). Terima kasih dari hati yang paling dalam penulis ucapkan karena telah mengisi hari-hari penulis dan mencurahkan kasih sayang selama lebih kurang tiga tahun. Hanya segenap doa yang bisa penulis kirimkan untuk kebaikan dan kebahagiaan engkau.

Akhirnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalamnya yang tidak luput dari kesempurnaan penulis sendiri.

Padang, Oktober 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembahasan dan Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Analisis.....	7
E. Metode dan Bahan Sumber.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: SUMATERA BARAT SEBELUM REFORMASI.....	15
A. Transformasi Politik Menuju Orde Baru di Sumatera Barat.....	15
B. Perkembangan Politik di Sumatera Barat Masa Orde Baru.....	24
C. Dunia Usaha di Sumatera Barat.....	31
BAB III: PENGUSAHA DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT SEJAK ERA REFORMASI.....	40
A. Kondisi Ekonomi Sumatera Barat Pada Era Reformasi.....	40
B. Kondisi Politik Sumatera Barat Pada Era Reformasi.....	50
C. Pengusaha Dalam Dunia Politik di Sumatera Barat.....	62
BAB IV: PROFIL PENGUSAHA POLITIK DI SUMATERA BARAT.....	79
A. Afrizal.....	79
B. Syukriadi Syukur.....	84
BAB V: KESIMPULAN.....	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 95
DAFTAR INFORMAN..... 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....101

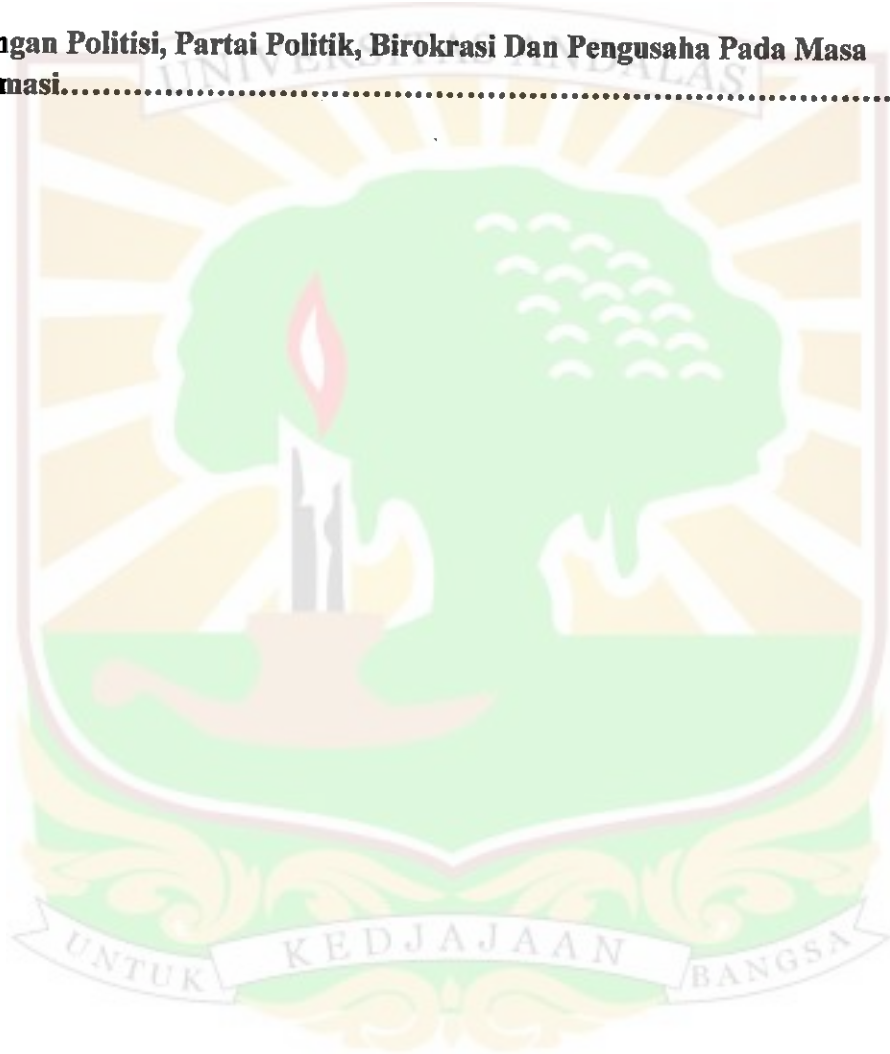


DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Hal.
Tabel 1: Kunjungan Wisata ke Sumbar dari Th. 2005-2009.....	47
Tabel 2: Hasil Pemilu 1999 Sumbar Berdasarkan Perolehan Kursi di DPRD Sumbar...	52
Tabel 3: Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI.....	57
Tabel 4: Hasil Pemilu 2004 SUMBAR Berdasarkan Perolehan Kursi di DPRD Sumbar..	58
Tabel 5: Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pilkada 2005.....	61
Tabel 6: Pengusaha Dalam DPRD Sumbar 2004-2009, Daerah Pemilihan IV.....	70
Tabel 7: Pengusaha Dalam DPR RI 2009-2014 Wilayah Pemilihan Sumbar I.....	71
Tabel 8: Daftar Nama Bupati dan Walikota Yang Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2004-2005.....	74

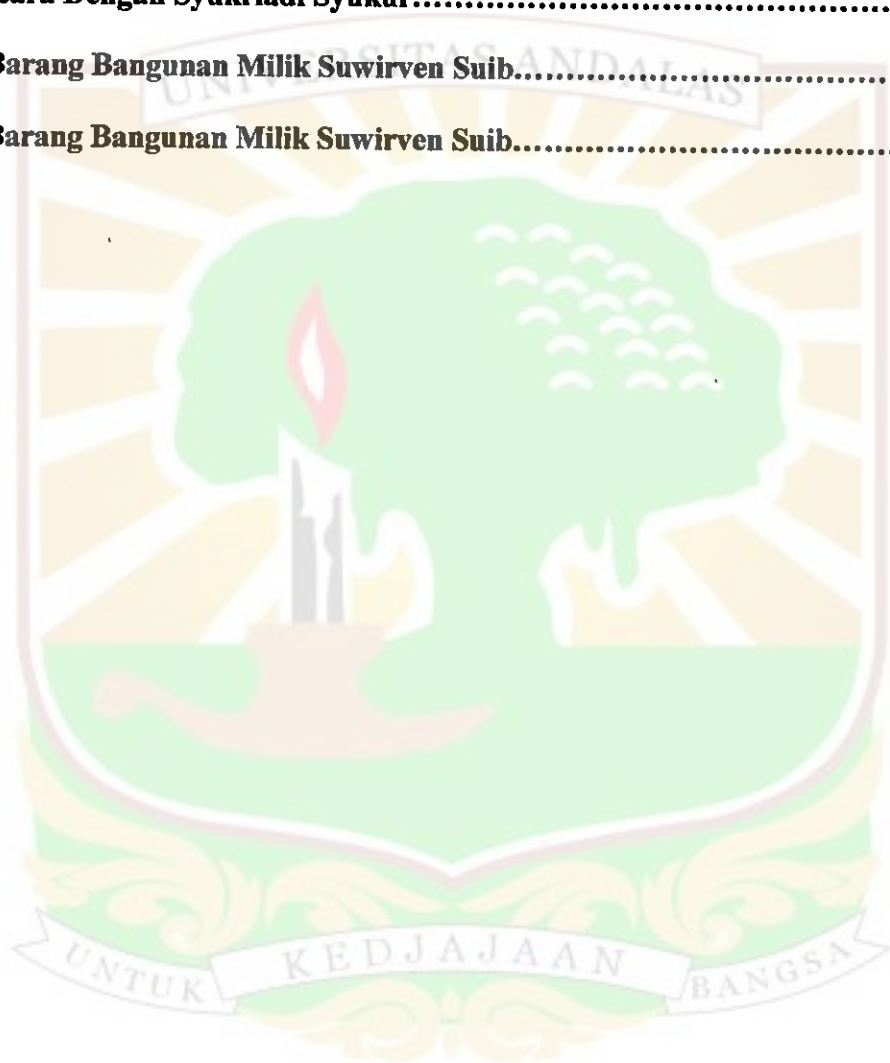
DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah Dan Birokrasi Masa Orde Baru...	11
Bagan 2. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah, Partai Politik Dan Birokrasi Pada Masa Reformasi.....	11
Bagan 3. Hubungan Politisi, Partai Politik, Birokrasi Dan Pengusaha Pada Masa Reformasi.....	11



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Dengan Suwirven Suib.....	101
2. Foto Wawancara Dengan Syukriadi Syukur.....	101
3. Foto Usaha Barang Bangunan Milik Suwirven Suib.....	102
4. Foto Usaha Barang Bangunan Milik Suwirven Suib.....	102



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Perencanaan Belanja Daerah
Apindo	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
Caleg	: Calon Legislatif
Dapil	: Daerah Pemilihan
Dirut	: Direktur Utama
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gapensi	: Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia
Kadin	: Kamar Dagang dan Industri
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KP	: Kuasa Penambangan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MM	: Minang Malindo
SP	: Semen Padang
Sumbar	: Sumatera Barat
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PETI : Penambangan Tanpa Izin

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PP : Peraturan Pemerintah

PT : Perseroan Terbatas

PT BA UPO : Perseroan Terbatas Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin

PT MM : Perseroan Terbatas Minang Malindo

UKM : Usaha Kecil Menengah

UU : Undang-undang



DAFTAR ISTILAH

Afiliasi	: Bentuk kerjasama antara dua lembaga, biasanya satu lebih besar daripada yang lain tetapi masing-masing berdiri sendiri.
Akomodasi	: Sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan.
Ali Baba	: Sistem ekonomi yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan China dan diterapkan pada masa pemerintahan Orde Lama.
Apatis	: Acuh tak acuh, tidak peduli, masa bodoh.
Bargaining	: Tawar-menawar, biasanya kata-kata ini dipakai dalam istilah politik praktis.
Berkoalisi	: Kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen.
Budget	: Anggaran
Checks and Balances	: Salah satu fungsi dari lembaga legislatif ataupun partai oposisi untuk melakukan kontrol dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan.
Client	: Klien, seseorang yang membeli sesuatu dan memperoleh layanan.
Client Businessmen	: Pengusaha yang mempunyai jaringan dan koneksi di pemerintahan atau birokrasi.
Cost	: Biaya
Cukong	: Orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan lain; Pemilik modal.

Desentralisasi	: Sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah.
Ekspansi	: Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki wilayah negara lain; perluasan daerah kekuasaan.
Elite	: Golongan yang terpandang/terkemuka; orang-orang yang terpilih dalam suatu kelompok; kaum terkemuka atau berderajat tinggi (bangsawan, cendekiawan, pejabat, dll)
Euforia	: Perasaan nyaman, perasaan gembira secara berlebihan.
Event	: Acara.
Fungsioaris	: Pejabat (pegawai atau anggota partai) yang menduduki suatu fungsi.
Headline	: Berita Utama.
Ideologi	: Cara berpikir seseorang atau golongan; paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.
Image	: citra; pencitraan diri
Implementasi	: Pelaksanaan, penerapan.
Insfrastruktur	: Prasarana.
Integritas	: Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.
Kampanye	: Gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi) ; Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan di parlemen.

Kapitalisme Semu	: Sistem ekonomi kapitalis yang tidak terlihat dengan jelas karena adanya campur tangan pemerintah.
Kredibilitas	: Perihal, dapat dipercaya.
Koalisi	: Kerjasama antar beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen.
Kolega	: Teman sejawat, kawan sepekerjaan.
Konsesi	: Izin untuk membuka tambang, menebang hutan, dsb. Kerelaan dari kedua belah pihak.
Konservatif	: Kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.
Konsekuensi	: Akibat dari suatu pekerjaan, perbuatan.
<i>Law enforcement</i>	: Penegakan Hukum.
Lisensi	: Surat izin untuk mengangkut barang dagangan, usaha. Pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh izin ekspor-impor.
<i>Lips Service</i>	: Hanya ucapan secara lisan dan tidak bisa dibuktikan dalam perbuatan maupun sikap.
Lobi	: Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi, seperti parlemen dan partai politik.
<i>Local Government</i>	: Pemerintahan Daerah
<i>Money Politics</i>	: Politik Uang; politik yang sarat dengan permainan uang.
Negosiasi	: Proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Oligarki	: Sistem Pemerintahan yang hampir keseluruhan kekuasaannya dipegang oleh segelintir orang yang mempunyai kekayaan berlimpah tapi tidak memiliki kualitas kepemimpinan lainnya
Patron	: Pola, teladan.
Pialang	: Perantara dalam kegiatan jual beli; makelar.
Platform	: Rencana kerja; program. Pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan.
Pragmatis	: Bersifat praktis dan berguna untuk umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan; mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.
Proteksi	: Perlindungan (dalam perdagangan dan industri, dsb)
Rente	: Bunga uang, riba.
Rezim	: Tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa.
Simbiosis Mutualisme	: Hubungan yang saling menguntungkan antara dua organisme.
Status Quo	: Keadaan atau kedudukan utama yang diperoleh seseorang, kelompok dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.
Spin-off	: Pemisahan anak perusahaan dari perusahaan induk (<i>holding</i>).
Supremasi	: Kekuasaan tertinggi.
Tender	: Tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang.
Track Record	: Perjalanan atau riwayat hidup seseorang.
Tren	: bergaya mutakhir, bergaya modern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara dunia usaha dengan dunia politik bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa di negeri ini telah menghasilkan kebijakan yang di antaranya adalah dorongan atas pertumbuhan dunia usaha pribumi yang tercermin dalam kebijakan Ali Baba atau Baba Ali pada tahun 1950-an.¹ Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai *Client Businessmen*, dimana pengusaha-pengusaha bekerja dengan dukungan dan proteksi dari jaringan kekuasaan pemerintahan.²

Para pengusaha mempunyai *patron* dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan mereka sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Mereka lahir di luar aparat birokrasi dan biasanya juga masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sedang berkuasa.³ Arief Budiman menyebut pola hubungan ini sebagai sebuah hasil dari perkembangan "kapitalisme semu" yaitu adanya campur tangan pemerintah yang terlalu banyak sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat dunia usaha Indonesia menjadi tidak dinamis. Kondisi ini semakin diperburuk oleh perkembangan dunia usaha Indonesia yang tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai, akibatnya tidak terjadi industrilisasi yang mandiri.⁴ Ikatan *patron* dan *client* ini semakin kuat dengan bergabungnya para pengusaha tersebut dalam

¹ Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik* (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 152.

² *Ibid.*, hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. Xiv.

partai berkuasa, terutama pada masa rezim Orde Baru. Pada umumnya para pengusaha itu bergabung dalam partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah dan berkuasa.⁵ Siti Hardianti Rukmana, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla adalah beberapa nama yang tergabung dalam partai yang berlambang pohon beringin tersebut.

Pasca tumbangya Rezim Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami perubahan. Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 1999⁶ membuat Indonesia mulai menerapkan sistem multi partai. Sistem ini telah mendorong tumbuhnya partai-partai di luar partai yang telah ada sebelumnya seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terdapat 48 partai yang bersaing dalam perebutan kekuasaan pada pemilu 1999, di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sistem multi partai ini juga mengharuskan setiap partai untuk menghidupi diri sendiri. Kekuatan finansial partai menjadi salah satu penentu kekuatan partai bersaing memperebutkan kekuasaan di parlemen yang selanjutnya berdampak pada "bargaining" bagi penempatan orang-orang partai di legislatif. Salah satu akses bagi kekuatan finansial itu didapatkan dari para pengusaha.⁷

Sistem multipartai ini telah membuka peluang yang sangat luas bagi para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di dunia politik. Budaya *patron* dan *client* yang telah terbentuk membuat pengusaha dan politikus mencari jalan untuk saling mendukung pada pengusahaan atas politik dan dunia usaha. Keterlibatan para pengusaha pada partai politik tidak lagi terkonsentrasi pada satu partai saja tetapi

⁵ Aries Kelana dan Rohmat Haryadi, *Yang Makmur Di Pentas Politik* (www.gatra.com/22 januari 2002), diunduh dari (www.gatra.com/17 februari 2010).

⁶ Kutipan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, diunduh dari (www.tempointeraktif.com/26 maret 2004), tanggal 15 Juni 2010.

⁷ Aries Kelana, *op. cit.*, hlm.1.

partai terbesar, terutama pada masa rezim Orde Baru pada umumnya partai berusaha itu berkembang dalam partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah dan berkuasa.² Siti Hardianti Rukman, Abdul Basir, Justy Kalla adalah beberapa nama yang terdapat dalam partai yang berkembang pesat dengan cepat.

Pada tahunannya Revisi Orde Baru sistem politik Indonesia mengalami perubahan. Perundang-undangan UU No. 2 Tahun 1999 "mendukung Indonesia mulai menerapkan sistem multi partai. Sistem ini telah mendorong tumbuhnya partai-partai di luar partai yang telah ada sebelumnya seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terdapat 48 partai yang bersaing dalam pemilihan kekuasaan pada pemilu 1999, di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sistem multi partai ini juga menyebabkan setiap partai mulai menghidupi diri sendiri. Kekuatan finansial partai menjadi salah satu pemicu kekuatan partai bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen yang sebelumnya terkumpul pada "pengumpul" bagi pembentukan orang-orang partai di legislatif. Salah satu akses bagi kekuatan finansial ini diberikan dari para pengusaha.³

Sistem multipartai ini telah membuka peluang yang sangat luas bagi para pengusaha untuk terlibat dan berpartisipasi di dunia politik. Banyak orang dan bisnis yang telah terbentuk membuat pengusaha dan politikus mencari jalan untuk saling mendukung pada penggunaan atas politik dan dunia usaha. Keterlibatan para pengusaha pada partai politik tidak lagi terkonstruksi pada satu partai saja tetapi

² Aris Kelana dan Rohmat Harjadi, *Yang Vokasional: The Politics of Policy* (www.kelana.com/2002/03/02/), diambil dari (www.gatra.com/17 february 2010).
³ Kumpulan Penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, diambil dari (www.temboinierakti.com/26 maret 2004), tanggal 12 Juni 2010.
 Aris Kelana, op. cit. hlm.1.

menyebar pada banyak partai lainnya. Contohnya dalam Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir dan Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Soetrisno berasal dari Pekalongan dan berlatar belakang pengusaha batik dan Zulkifli Hasan merupakan pengusaha asal Lampung. Dalam jajaran kepemimpinan Partai PDI-Perjuangan, jabatan Sekjen diduduki oleh Pramono Anung yang merupakan pengusaha pertambangan.⁸

Trend pengusaha menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik tidak hanya pada tingkat nasional saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah. Salah satu daerah tersebut adalah Sumatera Barat. Nama-nama seperti Asli Chaidir, Djonimar Boer, Leonardy Harmainy dan Amran Nur adalah politikus yang mempunyai latar belakang sebagai pengusaha. *Trend* ini juga didorong oleh pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang memberi ruang yang luas bagi hubungan timbal balik antara kepentingan pengusaha dan penguasa di daerah.⁹

Untuk kasus Sumatera Barat, Israr Iskandar menyebutkan bahwa pengusaha di daerah ini membangun akses ke sumber kekuasaan atau terjun langsung ke dalam aktivitas politik untuk kepentingan bisnis mereka.¹⁰ Bukan hal yang aneh jika banyak proyek pembangunan dikerjakan oleh pengusaha yang memiliki akses pada sumber kekuasaan baik politik maupun ekonomi.¹¹

Ada beberapa buah buku dan artikel yang membahas kiprah para pengusaha di dunia politik Indonesia, di antaranya adalah *Bisnis Dan Politik* yang

⁸*Ibid.*

⁹Kutipan Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diunduh dari (<http://www.unisosdem.org/otonomi/uu22-penjelasan.htm>/10 mei 2010), tanggal 15 Juni 2010.

¹⁰Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Tbk 1999-2003* (Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 39.

¹¹*Ibid.*, hlm. 39.

ditulis oleh Yahya Muhaimin. Buku ini menjelaskan tentang "perselingkuhan" antara penguasa dengan pengusaha sebagai dampak dari pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai masa Orde Baru.¹²

Untuk kasus Sumatera Barat dibicarakan dalam buku *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk (1999-2003)* yang ditulis oleh Israr Iskandar. Buku ini menjelaskan adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah lokal dalam hal ini Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dan modal asing menyangkut masalah *spin-off* PT Semen Padang dari PT Semen Gresik. Israr juga memaparkan begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi ketika gerakan *spin-off* ini mulai diperjuangkan. Kondisi ini semakin diperparah ketika elit-elit lokal yang berjuang atas nama kepentingan daerah, juga ikut "bermain" dalam rangka menyelamatkan kepentingan bisnis mereka.¹³

Tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang membahas tentang kiprah para pengusaha di dunia politik khususnya di daerah Sumatera Barat belum begitu banyak. Kalau pun ada, tulisan-tulisan tersebut hanya berupa artikel yang dimuat di media massa lokal dan nasional. Contohnya, opini yang ditulis oleh Pangi Syarwi di salah satu media lokal Sumatera Barat yang berjudul *Rekam Jejak Pilkada di Indonesia*. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa pemilihan langsung kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif tidak terlepas dari politik "dagang sapi" dan sarat dengan *money politics*. Pemilihan langsung yang diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kapasitas dan

¹² Yahya Muhaimin, *op. cit.*

¹³ Israr Iskandar, *op. cit.*

kapabilitas serta dapat melaksanakan amanah rakyat justru semakin menyuburkan praktek KKN di daerah.¹⁴

Tema ini menarik didalami lebih jauh karena belum ada kajian tentang pengusaha-pengusaha yang terjun ke dunia politik di Sumatera Barat. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan tentang latar belakang yang mempengaruhi para pengusaha tersebut untuk terjun ke dunia politik. Karakteristik dan gaya kepemimpinan politikus yang berasal dari kalangan pengusaha serta peranan pengusaha dalam memajukan partai politik secara khusus maupun memajukan daerah secara umum. Untuk mencapai harapan tersebut, maka penulisan skripsi ini diberi judul “Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat Tahun 1999-2009”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penulisan ini berjudul “Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat Tahun 1999-2009”, guna melihat keterlibatan pengusaha dalam perpolitikan di Sumatera Barat serta motivasi atau yang melatarbelakangi pengusaha terjun ke dunia politik. Batasan temporal penelitian mencakup tahun 1999 sampai tahun 2009. Tahun 1999 dipilih sebagai batasan awal dari penelitian karena pada tahun ini dilaksanakan pemilu pertama pasca runtuhnya Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Runtuhnya rezim Orde Baru membuat demokrasi di Indonesia jauh lebih baik. Hal ini kemudian dapat dilihat ketika pada pemilu 1999, Indonesia kembali menerapkan sistim multi partai serta adanya larangan bagi PNS untuk terjun

¹⁴ Pangsi Syarwi, *Jejak Rekam Pilkada di Indonesia*, dimuat dalam Surat Kabar Singgalang, 28 Januari 2008.

langsung ke dunia politik dan penghapusan dwi fungsi ABRI. Kondisi ini kemudian membuka peluang bagi para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di dunia politik secara terang-terangan.

Sedangkan tahun 2009 dipilih guna melihat perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun pasca pemilu 1999. Pada tahun ini juga sistem pelaksanaan pemilu mengalami perubahan yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil pemilu. Konstantan yang memenangi pemilu adalah konstantan yang mempunyai dana yang cukup besar di samping mempunyai strategi yang bagus untuk memenangi pemilu. Penulis juga melihat dalam rentan tahun 1999-2009, struktur kepengurusan beberapa partai politik diduduki oleh kalangan pengusaha di Sumatera Barat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi para pengusaha yang ada di Sumatera Barat untuk terjun ke dunia politik pada masa Reformasi ?
2. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Orde Baru?
3. Bagaimanakah situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Reformasi sehingga pengusaha berminat untuk terjun ke dunia politik?

guna politik secara teratur-teratur.
kemudian membuka peluang bagi para pengusaha untuk terjun dan berkiprah di
tengah ke dunia politik dan pembangunan yang tinggi ABRI. Kondisi ini

sebelum tahun 2000 dipilih guna melihat perubahan yang terjadi dalam
kurun waktu 10 tahun pasca pemilu 1999. Pada tahun ini juga sistem pelaksanaan
pemilu mengalami perubahan yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil
pemilu. Kemudian yang menentukan pemilu adalah konstitusi yang mempunyai
duga yang cukup besar di samping mempunyai strategi yang bagus untuk
menentukan pemilu. Pemilu juga melihat dalam tahun 1999-2000, struktur
kepengurusan partai politik dimiliki oleh kalangan pengusaha di
Sumatera Barat.

Pemilihan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diuraikan
melalui beberapa berikut:

1. Apakah yang mempengaruhi para pengusaha yang ada di Sumatera
Barat untuk terjun ke dunia politik pada masa Reformasi ?
2. Bagaimana situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa
Orde Baru?
3. Bagaimana situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa
Reformasi sehingga berminat untuk terjun ke dunia politik?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Latar belakang yang mempengaruhi para pengusaha untuk ikut aktif dalam perpolitikan di Sumatera Barat
2. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Orde Baru
3. Situasi ekonomi dan politik Sumatera Barat pada masa Reformasi sehingga pengusaha berminat terjun ke dunia politik

D. Kerangka Analisis

Tulisan yang berjudul “Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat Tahun 1999-2009” ini merupakan kajian sejarah lokal yang ditujukan untuk melihat struktur dan proses tindakan atau interaksi manusia yang terjadi dalam kontek sosio-kultural di masa lampau dan dapat diungkapkan secara holistik dalam berbagai pendekatan seperti pendekatan politik ataupun ekonomi yang terjadi pada suatu lokalitas tertentu.¹⁵ Batasan tentang lokalitas ini ditegaskan oleh Taufik Abdullah sebagai "sejarah dari suatu tempat", yang batasannya ditentukan oleh penulis sesuai dengan konteks peristiwa di masa lalu.¹⁶

Konteks peristiwa masa lalu dalam tulisan ini menggunakan pendekatan politik untuk melihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan

¹⁵ Lihat Hecht, J.Jean, (*International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1968).

¹⁶ Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.15.

konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik serta sosialisasi politik.¹⁷

Keterlibatan pengusaha dalam dunia politik sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Elit pengusaha di Indonesia kadang berfungsi sebagai penguasa. Pemerintahan maupun keraton pada waktu dulu sesungguhnya sangat akrab bersentuhan dengan dunia usaha, sehingga di antara keduanya ibarat sekeping mata uang saja. Satu sisi adalah penguasa dan pada sisi lain adalah pengusaha. Hubungan yang begitu erat antara dunia usaha dengan kekuasaan menjadikan kelompok ini sebagai kelas menengah yang mandiri dan faktor perubahan tidak dapat diharapkan, karena mereka berada dalam kelompok yang sama. Ketidakmandirian dunia usaha di Indonesia dapat dilihat dalam sejarah ekonomi Indonesia. Kekuasaan para pejabat birokrasi mempermudah para pengusaha mendapatkan surat istimewa atau *kattabeletje* yang digunakan untuk memperoleh lisensi dari pemerintah. Hal itu memperlihatkan hubungan timbal balik antara penguasa dengan pengusaha.¹⁸

Yoshihara Kunio dalam bukunya yang berjudul *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara* berpendapat, bahwa kedua kelompok itu (pengusaha dan penguasa) memiliki ketergantungan satu sama lain. Para pengusaha di Indonesia tidak mandiri dan takut bersaing dengan kompetitornya tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Kunio juga menambahkan, para pengusaha tersebut kebanyakan hanyalah pemburu rente yang mencari keuntungan dari proyek-proyek pemerintah.¹⁹

¹⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), hlm.173.

¹⁸ Yahya Muhaimin, *op. cit.*

¹⁹ Yoshihara Kunio, *op. cit.*

Kondisi demikian menyebabkan kapitalisme yang berkembang di Indonesia hanya bersifat semu dan tidak mengacu pada perkembangan kapitalisme murni yang terjadi di negara-negara lain. Jepang misalnya, para kapitalis di sana lebih banyak melakukan inovasi dan adanya persaingan yang terbuka antara satu sama lain. Berbeda dengan Indonesia, perkembangan kapital sebagian besar terbatas di sektor tersier dan dikuasai oleh modal asing, terutama China. Meskipun hal ini tidak begitu tepat, di bawah berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong kewirausahaan bumi putera, namun para kapitalis China masih tetap dominan memegang kendali yang sesungguhnya atas perkembangan kapitalisme.²⁰

Jika pada masa pemerintahan Sukarno, politik dianggap sebagai panglima karena kegiatan politik lebih penting ketimbang kegiatan ekonomi. Pada Orde Baru, jargon atau istilah tersebut kemudian diganti dengan “ekonomi sebagai panglima”. Hal ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru menganggap perkembangan politik pada masa Orde Lama telah menyebabkan kehancuran di bidang ekonomi, maka kegiatan politik direduksi dan ekonomi mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan “pembangunan” menjadi kosakata resmi dari pemerintahan Orde Baru.²¹

Pemerintahan Orde Baru diwarnai oleh tiga fenomena yang menarik. Pertama, adanya kerjasama antara pimpinan militer dengan pengusaha keturunan China. Kedua, kompetisi antara pengusaha keturunan China dengan pengusaha pribumi dan yang ketiga, perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah pengaruh dan kontrol militer. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, para pimpinan militer melakukan kerjasama dengan pengusaha keturunan China.

²⁰ Ibid.

²¹ Aria W. Yudhistira, *Kapitalisme Semu: Penguasa Dan Pengusaha Di Indonesia*, dimuat dalam Harian Seputar Indonesia, 5 Agustus 2010.



Beberapa Jendral memiliki perusahaan pribadi, dimana perusahaan tersebut dimodali oleh pengusaha-pengusaha keturunan China. Tidak hanya itu, militer juga memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Contohnya dalam hal pemberian lisensi, keputusan tentang proyek dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para birokrat.²²

Melihat kondisi tersebut, jargon “politik sebagai panglima” yang selalu dikampanyekan pada masa Orde Lama tetap dipakai dalam bentuk lain pada masa pemerintahan Suharto. Kekuatan politik tetap menjadi sumber utama dalam rangka mencari keuntungan ekonomi dan penguasaan sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Keadaan yang terjadi tersebut tentunya melahirkan pengusaha-pengusaha yang tidak mandiri karena mereka beroperasi dengan dukungan dan berada di bawah proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Para pengusaha tersebut mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi dan sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah.²³

Jika kondisi yang terjadi seperti itu, sangat sulit mengharapkan para pengusaha menjadi kelas menengah yang mandiri dan menjadi kekuatan politik alternatif. Alasan utamanya adalah kelompok menengah atau pengusaha yang ada merupakan perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga mereka tidak bisa melakukan kritik ataupun oposisi, karena mereka hanyalah klien dari sebuah

²² Irwan Setiawan, *Korupsi Dalam Dimensi Sejarah* ([www.keretaunto.blogspot.com/11 Desember 2009](http://www.keretaunto.blogspot.com/11-Desember-2009)), diunduh dari (www.keretaunto.blogspot.com), tanggal 11 Agustus 2011.

²³ Yahya Muhaimin, *op. cit.*

patron yaitu penguasa. Artinya, politisi dan pengusaha menjadi kekuatan untuk pembenaran dari setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa.²⁴

Peristiwa masa lalu dalam pendekatan politik yang hendak dilihat adalah bagaimana aktivitas pengusaha dalam mencapai kekuasaan politik dan memberikan pengaruh kebijakan politik di tingkat lokal. Lokalitas yang dimaksud sesuai dengan konteks peristiwa yaitu wilayah geografis Sumatera Barat.

Bagan 1. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah Dan Birokrasi Pada Masa Orde Baru



Bagan 2. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintah, Partai Politik Dan Birokrasi Pada Masa Reformasi



Bagan 3. Hubungan Politisi, Partai Politik, Birokrasi Dan Pengusaha Pada Masa Reformasi

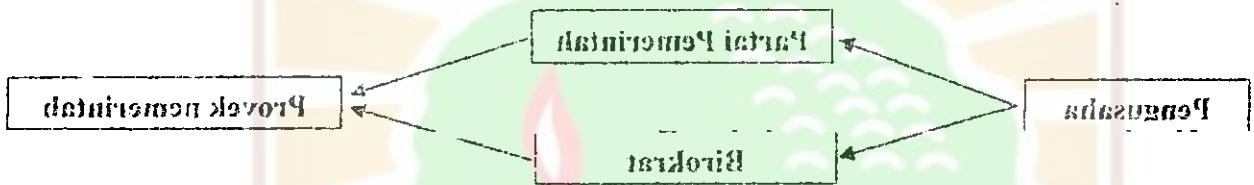


²⁴ Ibid.

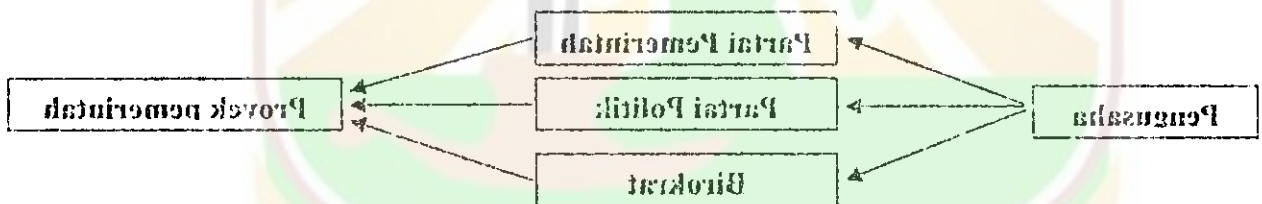
parton yaitu pengusaha. Artinya politisi dan pengusaha menjadi kekuatan untuk pemerintahan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pengusaha.²⁴

Peristiwa masa lalu dalam perkembangan politik yang hendak dilihat adalah bagaimana aktivitas pengusaha dalam menanggapi perkembangan politik dan memberikan pengaruh kebijakan politik di tingkat lokal. Lokalitas yang dimaksud sesuai dengan konteks peristiwa yaitu wilayah geografis Sumatera Barat.

Bagan 1. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintahan Dan Birokrasi Pada Masa Orde Baru



Bagan 2. Hubungan Pengusaha, Partai Pemerintahan, Partai Politik Dan Birokrasi Pada Masa Reformasi



Bagan 3. Hubungan Politisi, Partai Politik, Birokrasi Dan Pengusaha Pada Masa Reformasi



Pengusaha yang ada pada masa Orde Baru lebih banyak berafiliasi dengan partai pemerintah. Hubungan keduanya kemudian didukung oleh kekuatan birokrasi sehingga mempermudah pengusaha mendapatkan akses langsung terhadap pengerjaan proyek-proyek pemerintah. Pola ini kemudian berlanjut pada masa Reformasi, bedanya para pengusaha banyak mengisi struktur kepengurusan partai-partai politik selain partai pemerintah. Pada masa Reformasi juga ditemukan beberapa kasus yang menarik, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha dadakan. Pengusaha ini lahir karena memanfaatkan jabatan dan pengaruhnya serta mampu melihat peluang dari situasi ekonomi dan politik yang terjadi pada saat mereka berkuasa.

E. Metode Penelitian

Metode sejarah yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode sejarah dapat dibagi dalam empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁵ Lebih jauh, Louis Gottschalk menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Berbeda dengan Gottschalk, Nugroho Notokusanto mengatakan bahwa, metode sejarah ialah prosedur daripada kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau.²⁶

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode sejarah. Heuristik secara singkat dapat diartikan sebagai tahapan dalam mencari dan mengumpulkan

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1975), hlm. 50.

²⁶ Pendapat Nugroho Notokusanto dikutip oleh E. Kosim, lebih jauh lihat *Metode Sejarah; Asas dan Proses* (Bandung: UNPAD Press, 1983), hlm. 32.

sumber-sumber atau informasi tentang masa lampau. Sumber-sumber dari penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan. Informan yang diwawancarai berasal dari anggota DPRD di Sumbar yang mempunyai latar belakang pengusaha. Rumusan pertanyaan menjadi suatu hal yang sangat penting supaya menghasilkan data yang objektif dan mendalam dari setiap informan yang diwawancarai.

Selain dari wawancara, studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data-data primer dan data sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Data-data tersebut berasal dari kliping koran, makalah-makalah, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik sumber baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber atau informasi agar bisa dipercayai, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber.²⁷

Kritik dari sumber ini bertujuan untuk mendapatkan kevalidan dari setiap data yang ditemukan di lapangan. Dari semua data-data yang diperoleh, lalu diinterpretasikan, kemudian dijelaskan dengan mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas)²⁸ untuk mendapatkan suatu benang merah antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya dari kasus yang diteliti.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dilakukan terhadap data primer maupun sekunder yang telah diperoleh. Setelah itu, yang

²⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm 95.

²⁸ Louis Gottschalk, *op. cit.*

harus dilakukan adalah melihat “benang merah” atas data yang telah ada, kemudian dituliskan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) sehingga didapatkan sebuah gambaran tentang keterlibatan pengusaha dalam dunia politik pada era reformasi di Sumatera Barat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menggambarkan suasana Sumatera Barat sebelum Reformasi. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, pertama transformasi politik Sumatera Barat menuju Orde Baru. Kedua, membahas tentang perkembangan politik di Sumatera Barat masa Orde Baru, dan yang ketiga membahas tentang dunia usaha di Sumatera Barat.

Bab III membahas tentang pengusaha dan politik di Sumatera Barat pada masa reformasi. Sama halnya dengan bab II, pembahasan dalam bab III juga terdiri dari tiga sub bab. Pertama, pembahasan mengenai kondisi ekonomi Sumatera Barat pada era Reformasi. Kedua, membahas tentang kondisi politik Sumatera Barat pada era Reformasi, dan sub bab ketiga membahas tentang pengusaha dalam dunia politik di Sumatera Barat.

Bab IV membahas tentang profil singkat beberapa orang pengusaha yang aktif dalam dunia politik di Sumatera Barat. Dari profil singkat pengusaha tersebut, akan dapat dilihat latar belakang kehidupan pengusaha itu sebelum dan

sesudah masuk ke dalam dunia politik. Selain itu, motif yang mendasari pengusaha untuk terjun ke dunia politik dapat dilihat pula secara jelas.

Bab V merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan gambaran secara umum tentang hasil dari penemuan-penemuan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

SUMATERA BARAT SEBELUM REFORMASI

A. Transformasi Politik Menuju Orde Baru Di Sumatera Barat

Sumatera Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti M. Hatta, Sutan Syahrir, M. Yamin, M. Natsir, H. Agus Salim, Tan Malaka dan lain-lain. Tokoh-tokoh ini kemudian memberikan kontribusi yang nyata dalam perjalanan sejarah Indonesia, baik dalam hal pemikiran maupun pergerakan. Tidak hanya sebatas itu, daerah ini juga selalu berada di garis terdepan dalam hal mengkritisi setiap kebijakan pemerintah pusat yang cenderung sentralistik.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi sosial, sejarah dan budaya masyarakat Sumbar mempengaruhi proses pembentukan (formasi) elit lokalnya. Selain itu, masyarakat Sumbar dari dahulunya dikenal sebagai masyarakat yang relatif egaliter.¹ Masyarakat Minang yang mendiami daerah Sumbar secara filosofis menganggap bahwa pemimpin itu hanya *ditinggian sarantiang didahulukan salangkah*, hal ini kemudian memberikan konsekuensi apabila seorang pemimpin bertindak sewenang-wenang dan tidak aspiratif, maka rakyat atau lembaga perwakilan rakyat dapat mengkritiknya bahkan menggantinya dengan pemimpin yang dianggap lebih baik.²

¹ Israr Iskandar, *Elit Lokal dan Pemerintahan....* sebagaimana dikutip dari Ali Akbar Navis, *Yang berjalan Sepanjang Jalan: Kumpulan Karangan Pilihan* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 28.

² Israr Iskandar sebagaimana dikutip dari Emeraldy Chatra, *Adat Selingkar Desa* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik & Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas, 1999), hlm.29.

Watak politik dan karakter orang Minang inilah yang kemudian mewarnai watak nasionalisme Indonesia yang tumbuh di Sumbar. Ditambah lagi adanya perpaduan pandangan islam dengan bermacam-macam ideologi yang berkembang pada waktu itu menjadikan orang-orang Minang mempunyai tempat tersendiri dalam panggung sejarah Indonesia. Perpaduan tersebut kemudian membuat gerakan nasionalisme yang tumbuh di Sumbar tidak bersifat elitis dan menghargai perbedaan cara dan sikap dalam menantang penjajahan Belanda³.

Memasuki tahun 1950-an, Indonesia merupakan sebuah bangsa yang baru merdeka dan sedang belajar menata pemerintahannya sendiri. Meskipun, pada saat itu segala infrastruktur yang ada belum dapat dibenahi secara sempurna pasca perang kemerdekaan. Hal ini kemudian mengakibatkan daerah-daerah menjadi terabaikan oleh pemerintah pusat.⁴ Keadaan ini semakin diperparah ketika sistem demokrasi parlementer yang diterapkan oleh pemerintah dapat dikatakan gagal dalam memperbaiki kondisi Indonesia yang telah carut-marut. Justru, yang terjadi ketika itu hanyalah perebutan kepentingan dan kekuasaan yang dilakukan oleh partai-partai politik. Kondisi ini tentunya jauh dari cita-cita kemerdekaan dan menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam di hati rakyat Indonesia.

Sampai pertengahan tahun 1950-an, kondisi Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang sangat berarti. Malahan yang timbul justru sebaliknya, kekecewaan rakyat semakin membesar ketika pemerintah pusat tidak bisa mengakomodir aspirasi daerah yang menuntut adanya otonomi daerah. Tuntutan akan diterapkannya otonomi daerah lebih disebabkan karena tidak adanya

³ Amrinuddin, *Sumatera Barat, Pemberontak Yang Takluk* dalam *Harian Kompas*, 15 Oktober 2005.

⁴ Mestika Zed, *PRRI Dalam Pergolakan Daerah Tahun 1950-an* (www.nagari-nagarisaiber/17-03-2011), diunduh dari (www.nagari-nagarisaiber), tanggal 23 September 2011.

perimbangan keuangan yang wajar dan adil antara pusat dengan daerah.⁵ Pemerintah pusat juga tidak mampu melakukan tindakan yang efektif untuk melanjutkan pengembangan ekonomi di daerah-daerah dan selama ini hanya daerah Jawa yang dapat menikmati hasil dari pengembangan ekonomi tersebut.⁶

Untuk kasus Sumatera Barat, setelah pemilu 1955 hubungan politik antara pemerintah pusat dengan Sumatera Barat dan Sumatera Tengah semakin memburuk. Gejala ini sudah dapat dilihat sejak akhir tahun 1949, dimana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan di bidang militer, yakni menciutkan Divisi Banteng di Sumatera Tengah menjadi sebuah brigade militer di bawah komando militer yang berpusat di Medan.⁷ Kebijakan ini tentunya melukai hati prajurit Sumbar, mereka merasa apa yang mereka kobarkan selama ini tidak pernah dihargai oleh pemerintah pusat.

Kekecewaan masyarakat Sumbar semakin meningkat ketika pemerintah pusat menunjuk Ruslan Muljoharjo menjadi Gubernur Sumatera Tengah. Kebijakan tersebut mendapat pertentangan dari DPR-ST, namun yang terjadi pemerintah pusat tetap memaksakan keinginannya dan membekukan lembaga legislatif tersebut pada tahun 1951.⁸ Hasil dari pemilu 1955 juga jauh dari harapan serta tidak bisa menyelesaikan “kekosongan demokrasi” yang terjadi di Sumbar. Sementara itu di Jakarta, M. Hatta semakin frustrasi karena keterbatasan kekuasaannya sebagai Wakil Presiden. Kondisi ini tentunya menambah sakit hati masyarakat Sumbar dan menuduh pemerintah pusat telah bertindak dengan

⁵ *Ibid.*

⁶ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 266.

⁷ Syafrizal, “Ninik-Mamak Dalam Perubahan Politik Di Sumatera Barat Pada Awal Masa Orde Baru”, dalam *Analisis Sejarah* (No. 2, Oktober 2010), hlm. 48.

⁸ Syafrizal, sebagaimana dikutip dari Ichlasul Amal, “Hubungan Pusat-Daerah: Kasus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan”, dalam *Prisma* (No. 12, 1985), hlm. 73-76.

sewenang-wenang, bahkan mengorbankan provinsi Sumatera Tengah untuk kemakmuran daerah-daerah yang ada di pulau Jawa.⁹

Lahirnya Dewan Banteng pada akhir tahun 1956 merupakan jawaban atas kekecewaan dan ketidakpuasan dari berbagai persoalan yang melanda rakyat Sumbar. Mulai dari persoalan lokal, ketidakpuasan di kalangan perwira, sampai pada kemacetan sistem politik pasca revolusi, faktor Sukarno dan agitasi komunis, di samping tidak adanya kesabaran dari (elit) lokal untuk mengambil inisiatif sendiri.¹⁰ Kehadiran Dewan Banteng mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat Sumatera Tengah dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan, pada awal kelahirannya Dewan Banteng memusatkan tuntutannya pada empat bidang utama, yaitu: masalah negara pada umumnya; masalah yang khusus untuk Sumatera Barat; masalah pertahanan daerah; masalah-masalah sosial ekonomi rakyat daerah. Untuk kasus Sumatera Tengah, Dewan Banteng meminta kepada pemerintah pusat agar memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah tersebut dan menghidupkan kembali Divisi Banteng.¹¹

Tuntutan agar diberlakukannya otonomi daerah di Sumatera Tengah yang disuarakan oleh Dewan Banteng tidak mampu diakomodir dengan baik oleh Gubernur Ruslan Muljohardjo pada waktu itu. Keadaan tersebut kemudian membuat Ruslan meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Ahmad Husein.¹² Sewaktu Dewan Banteng memerintah, program-program pembangunan seperti pembangunan gedung sekolah baru, mesjid, pembangunan irigasi mendapat

⁹ Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 271-272.

¹⁰ Mestika Zed, *et al*, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 136.

¹¹ Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 280.

¹² Mestika Zed, *op.cit.*, Sumatera Barat hlm. 141-142.

simpati dan pujian karena hasilnya secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.¹³

Memburuknya hubungan pusat dengan daerah mengakibatkan semakin runyamnya kondisi politik di Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Kondisi tersebut menjadi lebih parah ketika Sukarno pergi ke Jepang tanpa ada alasan yang jelas. Keadaan ini kemudian membuat tokoh-tokoh daerah yang pro-perubahan berkumpul untuk menyatukan visi serta membentuk Dewan Perjuangan sebagai wadah untuk mengkoordinasi perjuangan daerah melawan pusat. Puncaknya, pada tanggal 10 Februari 1958, Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang berisi: (1). Kabinet Djuanda harus dibubarkan dalam tempo 5x24 jam dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden; (2). M. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru; (3). Kabinet baru yang dibentuk hendaknya diberi kesempatan untuk bekerja sampai pada pemilu berikutnya; (4). Sukarno ataupun Pejabat Presiden harus membatasi diri menurut konstitusi; (5). Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi maka kami akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri.¹⁴

Ultimatum tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintahan Djuanda, maka setelah melalui diskusi yang panjang dan masukan dari berbagai pihak, pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein resmi memproklamkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah kabinet Syafrudin Prawiranegara dan didukung oleh tokoh-tokoh politik lainnya seperti Burhanuddin

¹³ Sebagaimana dikutip dari R.Z. Leirissa, *PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991) dalam *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 145-146.

Harahap dan Sumitro.¹⁵ Pembentukan PRRI adalah bentuk protes daerah kepada pemerintah pusat yang menginginkan adanya otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Gerakan PRRI mendapat dukungan luas dari masyarakat, tokoh-tokoh adat dan resimen-resimen militer Sumatera Barat serta tidak ketinggalan pula dukungan dari mahasiswa. Bentuk dukungan yang diberikan oleh mahasiswa tersebut tidak hanya secara moral tapi juga secara fisik dengan turun ke medan pertempuran. Dukungan tidak hanya berasal dari mahasiswa Sumatera Barat, namun dukungan juga datang dari mahasiswa perantauan khususnya mahasiswa yang kuliah di Pulau Jawa.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat langsung bereaksi dengan mengerahkan seluruh angkatan perang yang ada. Kekuatan APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) diterjunkan pada waktu itu mencapai lebih 20.000 pasukan dan pada umumnya berasal dari Satuan Diponegoro.¹⁶ Untuk daerah Sumatera Barat, pimpinan tentara pusat membentuk Komando “Operasi 17 Agustus” yang dikomandani oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi yang dijalankan tersebut kemudian berhasil menguasai kota-kota di Sumatera Barat dalam jangka waktu tiga bulan.¹⁷ Hal tersebut membuat kekuatan PRRI lama-kelamaan dapat dipatahkan. Puncaknya, pada tanggal 29 Mei 1961 Ahmad Husein secara resmi

¹⁵ Eka Vidya Putra dkk, *Gerakan Mahasiswa & Otoritarianisme Negara: Sketsa Gerakan Mahasiswa Sumatera Barat 1958-1999* (Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia, 2003), hlm. 22.

¹⁶ Mestika Zed, *op.cit.*, PRRI Dalam Pergolakan Daerah Tahun 1950-an.

¹⁷ Syafrizal, *op.cit.*, Ninik-Mamak...sebagaimana dikutip dari Makmun Salim, *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-Permesta* (Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), hlm. 43.

menyerah yang diikuti oleh anak buahnya.¹⁸ Penyerahan tersebut menandai berakhirnya PRRI dan kembalinya Sumatera Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Peristiwa PRRI yang mendapat dukungan dari masyarakat luas, telah menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat Sumbar. Penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui serangkaian operasi militer juga memporak-porandakan kondisi sosial politik, budaya dan ekonomi daerah tersebut. Kekalahan itu juga menjatuhkan harga diri dan memukul mental orang-orang Minang, pasca PRRI perasaan malu dan terhina menyelimuti kehidupan orang-orang Minang.¹⁹

Selain menghancurkan kehidupan politik dan mental masyarakat Sumbar, gerakan PRRI juga menimbulkan kemiskinan yang merata di tengah-tengah masyarakat. Ekonomi daerah boleh dikatakan morat-marit, karena selama peristiwa PRRI banyak sarana dan prasarana ekonomi yang hancur.²⁰ Sedangkan di bidang politik, daerah Riau dan Jambi memperoleh keuntungan pasca peristiwa tersebut. Kedua daerah itu memperoleh “kemerdekaan” dalam pengertian diakui menjadi provinsi tersendiri dan lepas dari Sumatera Barat.²¹

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk melebarkan sayap dan pengaruhnya di Sumatera Barat. PKI memperoleh berbagai kemudahan dalam menjalankan aksi dan propagandanya. Kekosongan pemerintahan nagari setelah PRRI langsung dimanfaatkan oleh PKI dengan cara menempatkan wakil-wakilnya di struktur pemerintahan nagari. Hal ini tentunya membuat PKI dengan leluasa mengembangkan pengaruhnya ke masyarakat. Kekuatan PKI semakin bertambah

¹⁸ Mestika Zed, *op.cit.*, Sumatera Barat di Panggung Sejarah....., hlm. 152.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 157

²⁰ *Ibid.*, hlm. 172.

²¹ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 219.

ketika Sukarno membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan terlibat secara langsung dalam PRRI. Keadaan ini tentunya semakin membuat laju PKI kian tak terbendung, karena selama ini kedua partai tersebut sangat gencar dalam menentang gerak-gerik PKI.²²

Pembubaran kedua partai itu dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan balas dendam terhadap mantan anggota Masyumi dan PSI, yang juga ikut terlibat dalam PRRI. Kebijakan tersebut membuat kekuatan politik Islam di Sumbar semakin terjepit. Kalau di masa sebelumnya kekuasaan politik Islam sangat leluasa dalam beraktivitas maka setelah PRRI kondisi yang terjadi justru sebaliknya, kekuatan politik PKI sekarang berada di atas angin. Untuk memperkuat basisnya, PKI membentuk *underbouw* partai ke semua lapisan sosial masyarakat. Seperti, CGMI untuk mahasiswa, IPI bagi pelajar, PGRI-Non Fak Sentral bagi guru-guru, Lekra dalam kebudayaan dan lainnya.²³ Keadaan ini tentunya membuat anggota PKI mempunyai peranan yang penting dalam struktur pemerintahan dan militer, di tambah lagi pengaruh PKI juga semakin meluas di kalangan masyarakat Sumbar pada tahun 1960-an.

Setelah melakukan berbagai persiapan dan skenario yang matang, baik di tingkat daerah maupun pusat, PKI melakukan kudeta terhadap pemerintahan Sukarno melalui pemberontakan tanggal 30 September. Namun upaya kudeta tersebut dapat digagalkan oleh Suharto yang ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel. Kegagalan itu menimbulkan dampak yang besar bagi semangat juang mahasiswa, pelajar dan masyarakat. Mereka bersatu padu dan bergerak bersama untuk melakukan perlawanan balik dan meruntuhkan kekuatan PKI.

²² Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 195.

²³ Eka Vidya Putra dkk, *op.cit.*, hlm. 27.

Perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat juga menjalar ke daerah, termasuk Sumbar. Aksi massa dan demonstrasi besar-besaran merupakan wujud perlawanan rakyat Sumbar. Pengepungan Kampung Cino dan penyerangan terhadap kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang dilakukan oleh mahasiswa adalah bukti nyata perlawanan terhadap PKI.

Selain aksi massa dan demonstrasi, upaya pembersihan unsur-unsur PKI dilakukan di struktur pemerintahan dan militer di Sumbar. Untuk bidang militer, Kolonel Poniman terjun langsung membersihkan kalangan militer yang ada di Kodam III/17 Agustus serta Kodam VII/Diponegoro yang condong bahkan terlibat PKI. Sedangkan di bidang pemerintahan, pembersihan PKI dilakukan dalam lembaga pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR-GR).²⁴ Pembersihan tidak hanya dititikberatkan ke struktur pemerintahan dan militer, tetapi juga dilakukan di kalangan ninik mamak dan penghulu yang terlibat PKI. Setelah pembersihan tersebut, ninik mamak yang terlibat PKI tidak akan dilibatkan dalam membicarakan berbagai persoalan masyarakat dan urusan pemerintahan nagari di wilayah setempat. Untuk mewartakan serta menyatukan ninik mamak yang tidak terlibat PKI dibentuklah sebuah wadah baru yang bernama LKAAM.²⁵

Gerakan PRRI dan pemberontakan PKI membuat Sumbar berada di ambang kehancuran serta mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan daerah ini dengan pusat. Namun memasuki Orde Baru ketegangan relasi Sumbar dengan pemerintah pusat secara berangsur akhirnya mencair setelah masyarakat daerah ini mampu memperlihatkan “loyalitas” kepada pemerintahan Orde Baru melalui

²⁴ Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 218-219.

²⁵ Syafrizal, *op.cit.*, hlm. 51.

keberhasilan program pembangunan daerah yang berorientasi pada keutuhan nasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan Harun Zein dan Azwar Anas, dua Gubernur Sumbar yang mengangkat harga diri Ranah Minang di mata pemerintahan pusat dan sekaligus memulihkan relasi hubungan Sumbar dengan pusat pasca PRRI dan PKI.²⁶

B. Perkembangan Politik Di Sumatera Barat Masa Orde Baru

Pasca dua peristiwa besar yang melanda Sumatera Barat, yakni PRRI dan PKI membuat masyarakat Sumbar mengalami depresi dan krisis kepercayaan diri. Hal ini semakin diperparah dengan situasi dan kondisi politik yang belum kondusif dikarenakan adanya perpecahan dan konflik di tengah-tengah masyarakat serta partai-partai politik yang ada.²⁷ Kondisi tersebut mewarnai proses pergantian kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Harun Zein yang ditunjuk menjadi Gubernur pada saat itu memikul tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Ia dianggap sebagai figur sangat tepat untuk memimpin Sumbar ketika itu, ditambah lagi kedekatannya dengan mahasiswa dan pemuda akan mempermudah tugasnya dalam mengeluarkan Sumbar dari berbagai persoalan yang sedang terjadi.²⁸

Perekonomian yang belum stabil dan merosotnya kepercayaan diri masyarakat merupakan kondisi riil yang terjadi pada awal-awal kehadiran pemerintahan Orde Baru di Sumbar. Gubernur Harun Zein yang memerintah pada waktu itu berupaya sekuat tenaga untuk kembali memulihkan psikologis dan

²⁶ Syamsudin Haris, "Dinamika Politik DPRD Sumatera Barat : Ketika Kekecewaan Rakyat Menggumpal", dalam Moch. Nurhasim, ed, *Kualitas Keterwakilan Legislatif* (Jakarta : PPW LIPI, 2001), hlm. 89.

²⁷ Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 223.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 224.

perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Upaya yang dilakukannya untuk memulihkan psikologis masyarakat yang mengalami trauma melalui pendekatan terhadap masyarakat dan Harun Zein juga selalu menyediakan waktu kepada masyarakat untuk bertatap muka langsung di kediaman rumah dinasny. Cara-cara yang dilakukan oleh Harun Zein tersebut secara perlahan mampu membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat Sumatera barat.²⁹

Sementara itu, untuk memulihkan kondisi perekonomian, Harun Zein melakukan pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti pembangunan jalan dan irigasi. Pembangunan tersebut membuat perekonomian Sumbar kembali bergairah, masyarakat semakin mudah dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendistribusikan hasil buminya. Program rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh Harun Zein membutuhkan dana yang tidak sedikit. Adanya kedekatan antara Harun Zein dengan elit-elit nasional yang berkuasa pada waktu itu mempermudah cairnya dana bantuan dari Pusat ke Sumatera Barat.³⁰ Reputasinya di bidang ekonomi tidak perlu diragukan lagi, karena ia merupakan alumni dari Universitas Barkeley serta adanya hubungan yang sangat mesra dengan pejabat-pejabat di tingkat pusat membuat Sumbar mengalami kemajuan di bidang ekonomi.³¹

Mulai menggeliatnya perekonomian di Sumatera Barat juga memberikan pengaruh terhadap kondisi politik di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat dari kemenangan partai Golkar di Sumatera Barat pada Pemilu 1971. Kemenangan yang diperoleh Golkar merupakan suatu pencapaian

²⁹ *Ibid.*, hlm. 230.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 236-237.

³¹ Audrey Kahin, *op.cit.*, Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat Dan Politik Indonesia 1926-1998 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 395.

yang sangat luar biasa, mengingat partai ini merupakan pendatang baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Apalagi, selama ini masyarakat Sumbar selalu diidentikkan dengan kalangan Muhammadiyah maupun daerah yang merupakan basis terkuat dari partai Masyumi. Kemenangan yang diperoleh Golkar pada saat itu, menandakan terjadinya perubahan besar dalam diri masyarakat Sumbar. Perubahan ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat Sumbar menjatuhkan pilihan kepada partai Golkar sebagai sarana dalam melakukan perubahan.³²

Golkar muncul sebagai pemenang dalam pemilu waktu itu dan Sumatera Barat merupakan penyumbang terbanyak suara untuk Golkar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Perbandingan ini dapat dilihat dari hasil persentase, yaitu 63,2% dibanding 62% (suara nasional), dengan Partai Islam Parmusi hanya memperoleh 22,7% dan Perti 6,9%. Sebagai hasilnya, Golkar mampu menduduki 70% kursi di DPRD.³³ Kemenangan yang diperoleh Golkar pada pemilu 1971 di Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Golkar yang boleh dikatakan sebagai anak baru dalam kancah politik Indonesia mampu mendekati pemuka-pemuka yang menjadi tokoh panutan dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, Golkar juga melakukan pendekatan sekaligus mampu membujuk organisasi massa yang ada di Sumatera Barat untuk bergabung ke dalam tubuh partai tersebut. Kondisi objektif masyarakat Sumbar yang masih trauma pasca pemberontakan PRRI dan PKI juga memberikan pengaruh terhadap kemenangan Golkar. Kedua peristiwa tersebut meninggalkan

³² Mestika Zed, *op.cit.*, hlm. 251.

³³ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm. 404.

bekas dan luka yang dalam bagi masyarakat Sumatera Barat, sehingga membuat mereka bersikap realistis dan cenderung pragmatis dalam berpolitik.³⁴

Pemilu ke-2 pada masa Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977 hanya diikuti oleh 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golkar. Ketakutan akan sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Lama membuat penguasa Orde Baru ketika itu menginginkan agar setiap partai politik harus mempunyai azas yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, Suharto juga menyarankan beberapa partai yang berazaskan islam seperti Parmusi, NU, PSII dan Perti disatukan ke dalam satu partai yang beraliran spiritual-materil. Dari gabungan itulah terbentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tidak hanya itu, partai-partai lain seperti PNI, Murba, IPKI, Partai Katholik, dan Parkindo digabungkan ke dalam satu partai yang berbasis materiil-spiritual yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI).³⁵

Golkar tampil sebagai pemenang dalam pemilu tersebut, di Sumatera Barat Golkar mampu meraup suara sebanyak 951.279 (66,55%), diikuti PPP dengan total suara sebanyak 463.594 (32,43%) dan di tempat terakhir diduduki oleh PDI yang hanya mampu memperoleh suara sebanyak 14.583 (1,02%). Kondisi yang sama juga terjadi pada pemilu 1982, meskipun persentase perolehan suara Golkar di Sumatera Barat menurun jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hasil akhir menunjukan Golkar tetap berada di urutan terdepan dalam perolehan suara. Golkar mampu memperoleh 953.345 suara (60,33%), kemudian disusul oleh PPP dengan 613.595 suara (38,83%). Hasil yang mengecewakan justru diraih oleh

³⁴ Mestika Zed, *op. cit.*, hlm.252.

³⁵ Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi* (Yogyakarta: Cipta Pustaka, 2006), hlm. 216.

PDI, perolehan suara PDI di Sumatera Barat pada pemilu ini mengalami penurunan dan hanya mampu memperoleh suara sebanyak 13.408 (0,84%).³⁶

Kemenangan Golkar di Sumatera Barat mencapai puncaknya pada pemilu 1987. Partai yang berlambang pohon beringin ini mampu meraup suara sebanyak 1.514.463 atau dengan persentase 87,811%.³⁷ Kemenangan Golkar ini tidak terlepas dari kebijakan Orde Baru yang menerapkan azas tunggal yakni, Pancasila untuk semua organisasi maupun partai politik. Penerapan azas tunggal ini secara perlahan mampu mengikis peran Islam dalam percaturan politik di Indonesia. Kebijakan ini kemudian juga mampu menyingkirkan keberadaan ulama ataupun tokoh agama yang mempunyai kharismatik dari arena politik. Hasilnya, dalam pemilu 1987 perolehan suara PPP merosot tajam baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Secara keseluruhan persentase suara PPP mengalami penurunan sebesar 16%.³⁸

Pemilu-pemilu selanjutnya yang diadakan di Sumatera Barat pada masa Orde Baru tidak mengalami perubahan yang signifikan. Golkar selalu tampil sebagai pemenang, dan yang lebih menarik perolehan suara Golkar di Sumatera Barat selalu melebihi rata-rata perolehan suara Golkar secara nasional. Kemenangan yang diperoleh Golkar dalam setiap pemilu di Sumatera Barat menandakan bahwa Sumatera Barat telah memasuki era baru, yang ditandai dengan perubahan yang cukup mendasar dalam sikap politik masyarakat Sumatera Barat.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 217.

³⁸ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm. 405-406.

³⁹ Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 253.

Perubahan cara pandang dan sikap politik masyarakat Sumatera Barat pada masa Orde Baru memberikan pengaruh yang cukup besar dalam tatanan masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari karakter serta tingkah laku elit-elit Sumatera Barat pada saat itu. Masyarakat Sumatera Barat yang dahulunya dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, pada masa Orde Baru tidak lebih dari “pengikut setia” kebijakan yang diterapkan oleh penguasa Orde Baru. Karakter elit yang ada pada zaman itupun, hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah dan cenderung bersifat feodalistis. Selain itu, lembaga-lembaga formal maupun informal yang dibentuk pada saat itu merupakan representatif negara.⁴⁰

Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan lembaga-lembaga formal maupun informal yang ada di Sumatera Barat merupakan bentuk lain dari penguasaan negara terhadap masyarakat Sumatera Barat. Tidak mengherankan lembaga seperti LKAAM yang merupakan wadah artikulasi budaya Minangkabau menjadi “bemper” politik Golkar pada masa Orde Baru.⁴¹ Padahal, terbentuknya LKAAM pada bulan Maret 1966 berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan seluruh ninik-mamak yang ada di Sumatera Barat. Keanggotannya juga harus lepas dari pengaruh PKI dan orientasi politik Orde Lama.⁴² Akan tetapi dalam perjalanannya, hampir seluruh Ketua LKAAM menjadi pengurus partai Golkar. Selain menjadi pengurus partai Golkar, ninik-mamak yang tergabung dalam LKAAM tersebut juga berusaha mempengaruhi anak-kemenakan atau warga nagarinya untuk memilih dan memberikan dukungan kepada partai Golkar pada

⁴⁰ Taufik Abdullah, “Pengantar” dalam Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. Xvii.

⁴¹ Israr Iskandar, *op.cit.*, hlm. 27.

⁴² Syafrizal, *op.cit.*, hlm. 52.

setiap pemilu.⁴³ Selain LKAAM, organisasi sosial yang memperjuangkan aspirasi perempuan Minangkabau, *Bundo Kanduang* juga tidak lepas dari cengkeraman Golkar.⁴⁴

Terbentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang menjadi wadah bergabungnya organisasi-organisasi kepemudaan (OKP) menampakan dominasi Orde Baru di kalangan pemuda. Ketua maupun pengurusnya sangat dekat dengan Golkar. Bahkan, setelah masa kepengurusannya berakhir, orang-orang tersebut kemudian menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur kepengurusan Partai Golkar. Alis Marajo dan Irfendi Arbi merupakan contoh yang berhasil memainkan peranan tersebut di Sumatera Barat. Kedua nama tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Umum KNPI serta pernah pula menjadi anggota DPRD dari Golkar.⁴⁵

Penguasaan Orde Baru terhadap masyarakat di Sumatera Barat tidak hanya sampai di situ saja. Pemimpin-pemimpin BUMN di Sumatera Barat yang dipandang berhasil segera dilamar oleh Golkar. Contoh yang nyata adalah Direktur Utama PT Semen Padang Ir. Azwar Anas. Setelah menjabat sebagai Direktur Utama Semen Padang dan dianggap berhasil memimpin perusahaan itu, karena mampu menyelamatkan pabrik semen tersebut dari ancaman kebangkrutan. Azwar Anas juga dikenal sebagai seorang perwira yang mempunyai hubungan yang baik dengan pusat. Jelas sekali, dengan kriteria seperti itu mempermudah Azwar Anas untuk duduk sebagai orang nomor satu di Sumbar menggantikan Harun Zein.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hlm. 54.

⁴⁴ Israr Iskandar, *op.cit.*, hlm. 29.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁴⁶ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm. 408.

Tokoh lain yang juga mencuat menjadi politisi dari perusahaan negara adalah Yanuar Muin. Keberhasilannya dalam memimpin PLN wilayah Sumatera Barat serta kedekatannya dengan tokoh-tokoh yang ada di pusat kemudian mengantarkannya berkiprah menjadi politisi Golkar.⁴⁷ Yanuar kemudian berkiprah di dunia politik dan pernah menjadi anggota DPR selama 2 periode. Nampaknya, ada sebuah ketentuan yang tidak tertulis dan berlaku pada masa Orde Baru yang mewajibkan pimpinan perusahaan negara wajib menjadi anggota Golkar, sehingga membuat mereka bisa leluasa berkiprah di dunia politik dan memberikan keuntungan secara finansial bagi partai Golkar dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Sumbar.⁴⁸

C. Dunia Usaha Di Sumatera Barat

Kemunduran ekonomi yang dialami oleh Sumbar pada awal pemerintahan Orde Baru membuat Harun Zein yang menjabat Gubernur saat itu, berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Kedekatannya dengan pejabat-pejabat penting yang ada di pusat serta kegigihannya dalam melakukan lobi membuahkan hasil yang cukup mengagumkan untuk Sumbar. Pemerintah Pusat kemudian mengalokasikan dana untuk membantu Sumbar keluar dari keterpurukan ekonomi. Selain melakukan lobi dengan pemerintah pusat, Harun Zein juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman untuk membuka perkebunan di wilayah Pasaman. Kerjasama ini bertujuan untuk membuka wilayah Pasaman yang sebelumnya

⁴⁷ Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 238.

⁴⁸ Taufik Abdullah, "Pengantar" dalam Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. xvii.

merupakan daerah terisolir dan menjadikan daerah ini sebagai daerah yang cukup potensial dan berkembang secara pesat dalam bidang ekonomi.⁴⁹

Strategi yang dijalankan oleh Harun Zein ketika itu secara perlahan mampu memperbaiki perekonomian Sumbar. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintah daerah serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat ketika Harun Zein menjabat sebagai Gubernur. Para perantau yang kembali ke kampung halaman dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi Sumbar juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kemajuan Sumbar. Salah satu contohnya adalah Januar Muin, yang pulang ke Sumbar untuk memimpin proyek pembangunan PLTA Batang Agam yang sudah lama terbengkalai. Setelah sukses menyelesaikan pembangunan PLTA Batang Agam, Januar Muin juga sukses menyelesaikan proyek pembangunan PLTA Singkarak.⁵⁰

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah Sumbar ternyata sangat ampuh dalam mengembalikan jati diri orang-orang Minang waktu itu. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik yang didukung oleh perbaikan sarana dan pra sarana penunjang menjadikan perekonomian Sumbar semakin menggeliat. Kondisi ini tentunya membuat Sumbar menjadi daerah yang cukup diperhitungkan dalam bidang ekonomi serta menjadi daerah yang berada di garis terdepan dalam melaksanakan pembangunan semasa Orde Baru.

Selama masa Orde Baru perekonomian rakyat Sumbar melaju dengan pesat. Hal ini dikarenakan ekonomi daerah Sumbar dibangun atas dasar kerjasama yang

⁴⁹ Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 239.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 238.

baik antara rakyat dengan pemerintahannya. Kegiatan ekonomi daerah Sumbar lebih banyak bertumpu kepada perekonomian rakyat yang berskala kecil seperti pertanian, perdagangan serta industri rumah tangga. Perekonomian rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dan dapat dirasakan pada pertengahan tahun 80-an hingga paruhan pertama dekade 90-an. Sektor pertanian, misalnya, tidak adanya modal asing serta hampir dapat dikatakan 100% dikerjakan oleh rakyat membuat Sumbar dapat menikmati surplus beras pada saat itu.⁵¹

Sektor perkebunan juga memberikan dampak yang cukup positif bagi kemajuan ekonomi Sumbar. Beberapa komoditi hasil perkebunan seperti cengkeh, karet, gambir, kayu manis, kopi dan sebagainya merupakan penyumbang ekspor terbanyak Sumbar kala itu. Kondisi demikian tentunya membuat daerah-daerah penghasil komoditi tersebut menjadi kaya dan makmur.⁵²

Struktur ekonomi Sumatera Barat dari masa Orde Baru hingga saat ini masih tetap bertumpu pada empat sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih dari 58%. Sektor pertanian menempati urutan pertama dengan kontribusi sebesar 23,57%, setelah itu sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 17,99%. Sedangkan sektor Jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 15,95%.⁵³

Perekonomian rakyat menjadi basis dan mendominasi ekonomi daerah Sumbar, hal ini dikarenakan tidak banyaknya industri-industri besar di Sumbar,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 318.

⁵² *Ibid.*, hlm. 319.

⁵³ *Sumatera Barat dalam angka tahun 2009* (Padang: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2009), hlm. 539.

tercatat hanya ada dua industri besar di daerah ini. Pertama, PT Semen Padang yang telah berdiri semenjak tahun 1910. Kedua, PT Tambang Batubara Ombilin yang terdapat di daerah Sawahlunto. Dua industri ini tidak terlalu bisa diandalkan karena badai krisis selalu menghantam kedua industri tersebut. Krisis Semen yang melanda Indonesia pada awal tahun 1990-an membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pelarangan ekspor dan lebih mengutamakan pendistribusian semen dalam negeri terlebih dahulu.⁵⁴ Lain halnya dengan industri batubara, semakin berkurangnya batubara mengakibatkan penurunan produksi dari tahun ke tahun.

Perantau juga mempunyai peranan dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat. Kepiawaian mereka dalam aktivitas ekonomi mampu melahirkan pengusaha-pengusaha besar baik di tingkat lokal maupun nasional. Peranan pengusaha-pengusaha tersebut semakin berarti ketika mereka turut serta dalam membangun daerah.⁵⁵ Gebu Minang adalah salah satu contoh dari institusi rantau yang turut serta dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat. Meskipun disinyalir pendirian institusi ini berasal dari Presiden Suharto, dimana para perantau menyisihkan uang sebesar Rp1000 per bulan untuk pembangunan kampung halaman.⁵⁶ Selain Gebu Minang, institusi-institusi rantau didirikan berdasarkan nagari dan wilayah teritorial yang ada di Sumatera Barat seperti PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman) dan SAS (Sulit Air Sepakat). Banyaknya pembangunan nagari dan pedesaan yang dirancang dan didanai dari rantau

⁵⁴ Mestika Zed, *op. cit.*, hlm. 320.

⁵⁵ Saudagar Minang Harus Memperkuat Networking ([www.riaumandiri.us/23 Oktober 2007](http://www.riaumandiri.us/23%20Oktober%202007)), *diunduh* dari (www.riaumandiri.us), tanggal 13 Juli 2011.

⁵⁶ Israr Iskandar, *op. cit.*, hlm. 31.

memperlihatkan bahwa hubungan perantau dengan kampung halamannya tidak terputus oleh jarak dan administrasi pemerintahan.

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak secepat provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena kurangnya industri-industri besar yang ada di Sumatera Barat dan hanya mengandalkan industri kecil dan menengah (UKM). Kondisi geografis Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan dikelilingi oleh Bukit Barisan dianggap tidak menguntungkan untuk kegiatan investasi, meskipun demikian Sumatera Barat tetap memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi penyebab keterbatasan dana pemerintah untuk membangun daerah. Keterbatasan dana pembangunan karena rendahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus dapat diisi oleh dana investasi dari swasta nasional atau asing.

Sekitar tahun 1990, Gubernur Hasan Basri Durin berusaha meningkatkan perekonomian Sumbar ketika itu dengan cara menarik investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk dapat menanamkan modalnya di Sumbar. Kebijakan ini ia terapkan karena melihat adanya perubahan dasar pemikiran yang mulai terjadi di tingkat nasional.⁵⁷ Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Durin berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kerjasama regional dengan beberapa negara di ASEAN. Untuk mencapai kerjasama tersebut Sumbar harus menjadi anggota dari “segitiga pertumbuhan” yang meliputi Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bentuk kerjasama tersebut berupa penyediaan tenaga kerja oleh

⁵⁷ Audrey Kahin, *op. cit.*, hlm. 415.

pemerintah daerah. Sedangkan, Singapura maupun Malaysia harus menyediakan modal untuk mendirikan industri-industri di Sumbar.⁵⁸

Banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Sumbar kemudian menumbuhkan usaha-usaha yang berskala lebih besar dari sebelumnya. Akan tetapi, pemerintah tetap sadar bahwa usaha kecil atau perekonomian rakyat tetap menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar yang masih saja di dominasi oleh sektor pertanian. Dengan masuknya investor ke Sumbar, berarti pemerintah harus mempersiapkan segala sarana dan pra sarana yang menunjang kegiatan investasi tersebut.

Perbaikan infrastruktur serta sarana penunjang seperti jalan dan dibukanya rute penerbangan internasional ke Kuala Lumpur dan Singapura merupakan bukti nyata dari keseriusan pemerintah untuk menarik hati para investor. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Sumbar ketika itu selain bertujuan untuk mendatangkan modal dan membangun jaringan perdagangan dengan pihak luar juga bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Sumbar.

Keindahan alam dan keunikan budaya Minangkabau merupakan potensi yang menarik untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki objek wisata untuk dikunjungi. Keindahan alamnya yang masih alami serta keunikan budaya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar negeri untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Keberadaannya diyakini sebagai sumber devisa yang akan mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 416.

Menggeliatnya perekonomian masyarakat di Sumbar berimbas kepada hadirnya pengusaha-pengusaha lokal yang memegang peranan penting dalam memajukan dunia usaha di Sumbar. Beberapa nama dari pengusaha lokal tersebut diantaranya; Basril Djabar (Harian Umum Singgalang), Rusmazar Ruzuar (PT. Wowo), Bachtiar Kahar (PT. Gurano Primakarsa) dan Asmawi Bahar (PT. Minang Permai Sejati). Para pengusaha tersebut juga menduduki jabatan dalam organisasi atau asosiasi pengusaha seperti KADIN (Kamar Dagang Industri), GAPENSI (Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia) dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Berdirinya KADIN di Sumbar tidak terlepas dari terbentuknya KADIN JAYA dan KADIN Indonesia. Beberapa pengusaha Sumbar yang mewakili unsur swasta, koperasi, perusahaan negara dan perusahaan daerah membentuk KADIN Sumbar pada tahun 1969. Pembentukan tersebut sesuai dengan amanah hasil Musyawarah Nasional KADIN yang pertama di Jakarta tahun 1968. Untuk periode pertama ini, KADIN Sumbar dipimpin oleh Azwar Datuk Rajo Palembang. Beberapa pengusaha terkenal Sumbar tergabung dalam organisasi ini, bahkan pernah menjadi Ketua Umum. Sebut saja, Basril Djabar yang memimpin KADIN Sumbar periode 1990-1994 dan 1994-1999.⁵⁹

Sejalan dengan perkembangannya, KADIN Sumbar melakukan kerjasama dengan Pemda Sumbar. Kerjasama ini dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembinaan dunia usaha di berbagai sektor, baik kecil maupun menengah. Selain itu, penyuluhan mengenai standarisasi peningkatan komoditas andalan Sumbar serta mengadakan pameran-pameran dagang seminar-seminar

⁵⁹ Lihat Buku potensi & Kebijakan KADIN Sumbar Terhadap Dunia Usaha Dan Bisnis Dalam Implementasi Otonomi Daerah, 2005.

tentang dunia usaha di Sumbar.⁶⁰ Kerjasama KADIN dengan Pemda juga dilakukan dalam bentuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah semisal pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pengusaha kontraktor yang tergabung dalam organisasi tersebut. Proyek-proyek pemerintah biasanya dikerjakan oleh para politisi Golkar yang berasal dari KADIN.⁶¹

Asnawi Bahar sebagai anggota KADIN dan pengurus Golkar yang juga merupakan menantu dari Gubernur Hasan Basri Durin mendapat prioritas utama dari proyek yang ditenderkan oleh Pemerintah Daerah. Contoh lain adalah Bachtiar Kahar yang juga pengurus Golkar mendapatkan tender pemerintah daerah dari posisinya sebagai anggota DPRD Sumbar. Persoalan yang terjadi kemudian adalah bagi kelompok pengusaha yang berada diluar Golkar. Sangat sedikit diantara tokoh-tokoh itu menjadi pengusaha, karena jika mengharapkan proyek pemerintah, maka kesempatan mereka akan menjadi sempit. Walaupun mereka menjadi pengusaha, mereka lebih mengharapkan proyek diluar pemerintah, seperti yang dilakukan Datuak Pado Sayia, seorang politisi PPP. Datuak Pado Sayia merupakan seorang kontraktor, yang bergerak di bidang perumahan. Selama menjadi politisi PPP, ia lebih banyak mendapat proyek di luar proyek pemerintah. Proyek-proyek yang dikerjakannya tentu lebih berskala kecil, karena untuk ukuran Sumatera Barat, semua proyek besar biasanya ditangani oleh pemerintah, sehingga proyek-proyek tersebut dikuasai oleh pengusaha yang berasal dari Golkar.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wawancara dengan Saharman Zanhar, politisi Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Juli 2010 di Padang.

⁶² Wawancara dengan Zamhar Baهران, yang merupakan anggota DPRD Sumbar periode 1982-1987, tanggal 20 Juni 2010 di Padang.

BAB III

PENGUSAHA DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT SEJAK ERA REFORMASI

A. Kondisi Ekonomi Sumatera Barat Pada Era Reformasi

Provinsi Sumatera Barat terletak di bagian barat tengah pulau Sumatera dengan luas 42.297,30 km persegi . Provinsi ini memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk Bukit Barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km.¹ Menurut kedudukan Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0,54° Lintang Utara sampai 3,30° Lintang Selatan serta 98,36° sampai 101,5° Bujur Timur. Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 (sembilan belas) kabupaten dan kota. Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau & Jambi dan sebelah Barat langsung menghadap Samudera Hindia.²

Struktur ekonomi Sumatera Barat masih didukung oleh empat sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Keempat sektor tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih dari 58% dari total keseluruhan Pendapatan

¹Lihat *Sumatera Barat dalam angka tahun 2009* (Padang: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2009).

²Letak Geografis Sumbar (www.sumbarprov.go.id/19 April 2007), diunduh dari (www.sumbarprov.go.id), tanggal 30 Mei 2011.

Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar sebesar 30,63 juta rupiah.³ Sektor pertanian menempati urutan pertama dengan kontribusi sebesar 23,57%, setelah itu sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 17,99%. Sedangkan sektor jasa lainnya memberikan kontribusi sebesar 15,95%.⁴

Perekonomian Sumatera Barat sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian walaupun peranan sektor pertanian memperlihatkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Setelah krisis ekonomi, peranan sektor pertanian cenderung meningkat dan sektor pertanian masih tetap dominan dan diperkirakan akan tetap menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat di masa depan.⁵ Sebagian besar penduduk Sumatera Barat masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian terutama pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan serta peternakan dan perikanan.

Pada triwulan III/2009 kinerja perekonomian Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 2,80 persen jika dibandingkan dengan triwulan pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,45 persen. Tingginya pertumbuhan pada sektor ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,52 persen, sub sektor Hotel sebesar 3,88 persen dan sub sektor Restoran sebesar 3,65 persen.⁶

Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak secepat provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena kurangnya

³ *Sumatera Barat dalam angka tahun 2009* (Padang: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2009), hlm. 539.

⁴ *Ibid.*, hlm. 539.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat* No. 54/11/13/Th. XII, 10 November 2009.

keberadaan industri-industri besar di Sumatera Barat, dan daerah ini hanya mengandalkan industri kecil dan menengah (UKM) sehingga mengakibatkan pembangunan berjalan dengan lambat. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi penyebab keterbatasan dana pemerintah untuk membangun daerah. Keterbatasan dana pembangunan karena rendahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) mestinya dapat diatasi lewat dana investasi dari swasta nasional atau asing. Ternyata usaha untuk peningkatan investasi swasta tersebut sering mendapat hambatan karena kondisi stabilitas dalam negeri akibat ketidakpastian politik, hukum dan keamanan nasional.

BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat setiap tahunnya dari tahun 1999 sampai 2009 tidak lebih dari 7%, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai 6,37%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 4,56%. Tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan 4,16% dari tahun 2008, hal ini tidak lepas dari pengaruh gempa yang mengguncang sebagian besar wilayah Sumatera Barat pada tanggal 30 september 2009.⁷

Tidak adanya industri-industri besar juga berpengaruh pada Produk Domestik Daerah Bruto (PDRB). Tahun 1999 atau tepatnya setahun setelah runtuhnya rezim Orde Baru, PDRB Sumbar hanya 4,56 juta naik sekitar Rp. 600 ribu jika dibandingkan dengan tahun 1998. Sepuluh tahun setelah reformasi berjalan PDRB Sumatera Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2008, dimana PDRB Sumatera Barat mencapai 14,83 juta rupiah. Tahun berikutnya meningkat sebesar 15,80 juta rupiah, meskipun

⁷ Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009. *Op.cit.*, hlm. 539.

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008.⁸

Kondisi geografis Sumatera Barat yang kurang menguntungkan karena langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan dikelilingi oleh Bukit Barisan juga berpengaruh terhadap laju perekonomian sehingga mengakibatkan kurangnya kegiatan investasi, meskipun demikian Sumatera Barat tetap memiliki potensi ekonomi yang cukup menjanjikan. Perairan di pantai barat menyimpan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, ditambah dengan kepulauan Mentawai yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Sementara itu di daerah *darek* pertanian dan perkebunan berkembang secara pesat. Perkebunan di daerah tersebut didominasi oleh perkebunan sawit, karet dan lada. Kondisi geografis Sumatera Barat yang dikelilingi oleh Bukit Barisan juga memberikan dampak yang positif, karena hutan-hutan yang ada di Bukit Barisan tersebut tentunya menjadi sumber resapan air dan juga berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan udara yang segar untuk kehidupan masyarakat.

Wilayah Sumatera Barat juga memiliki bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A berupa batu bara yang terdapat di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung, meskipun produksi batu bara tersebut setiap tahunnya semakin berkurang. Selain batu bara, di beberapa wilayah Sumatera Barat juga dikenal sebagai daerah penghasil emas. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Sijunjung, Dharmasraya dan Pesisir Selatan.⁹ Sehubungan akibat kurangnya fasilitas yang memadai dan sarana penunjang serta tidak adanya investor yang masuk untuk memberikan modal, maka penambangan

⁸ *Ibid.*, hlm. 539.

⁹ Potensi Ekonomi Sumbar (www.sumbarprov.go.id/19 April 2007), diunduh dari (www.sumbarprov.go.id), tanggal 30 Mei 2011.

emas hanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara-cara yang masih tradisional.

Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Solok, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil sedangkan di Padang Pariaman terdapat obsidian dan batu andesit.¹⁰ Salah satu hasil bahan tambang tersebut yang telah banyak memberi manfaat bagi perekonomian Sumatera Barat adalah batu kapur yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan semen, Sumatera Barat memiliki industri PT. Semen Padang yang telah berdiri sejak tahun 1910.

Kawasan laut Sumatera Barat merupakan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 186.580 Km², dengan garis pantai sepanjang 375 Km, mulai dari Kabupaten Pasaman sampai ke Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dimasukkan garis pantai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka panjang keseluruhan pantai di Provinsi Sumatera Barat tercatat 2.420 Km.¹¹ Hal ini tentunya merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan usaha budidaya laut di sekitar pantai.

Wilayah perairan laut Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan penangkapan ikan di laut. Luas perairan yang mencapai 186.580 Km² mampu menghasilkan ikan laut sebesar 340.930 ton per tahun.¹² Selain itu, perairan di Sumatera Barat juga menyimpan kekayaan sumber daya kelautan yang beragam. Mulai dari keanekaragaman hayati seperti ikan, terumbu karang dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat tahun 2009.*

¹² *Ibid.*

hutan bakau. Tidak hanya itu, kandungan mineral yang terdapat di dalamnya serta bahan-bahan tambang yang sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dieksplorasi dan eksploitasi dikarenakan berbagai keterbatasan.¹³

Banyaknya industri skala kecil dan rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Industri-industri tersebut merupakan industri penyangga yang pada tahun 2009 berjumlah 35.391 unit dan mampu menghasilkan nilai produksi sebesar 2.167.160.547 rupiah dari nilai investasi sebesar 628.492.895 rupiah.¹⁴ Selain pertambangan dan industri dengan skala kecil dan rumah tangga, keindahan alam dan keunikan budaya Minangkabau merupakan potensi yang menarik untuk dikembangkan sebagai objek pariwisata. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Keindahan alamnya yang masih alami serta keunikan budaya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar negeri untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Diresmikannya Bandara Internasional Minangkabau pada tahun 2005 dan semakin tumbuh suburnya hotel-hotel berbintang menjadi penyokong dalam kemajuan sektor pariwisata Sumatera Barat.¹⁵ Tercatat ada beberapa hotel yang berbintang empat, yaitu Pangeran Beach Hotel, Hotel Bumi Minang dan The Hills Hotel. Beberapa waktu yang lalu hotel dengan kelas bintang lima baru diresmikan di Kota Padang, yakni Best Western Basko Hotel dan Mercure Hotel.

¹³ *Mengangkat Potensi Bahari Sumbar*, Kompas 10 Februari 2006.

¹⁴ *Lihat Perkembangan Industri Kecil Sumatera Barat tahun 2009* (Padang: Dinas Koperasi dan Perdagangan, 2010).

¹⁵ Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang Dari PT Semen Gresik Tbk 1999-2003* (Jakarta: SAD Satria Bakti, 2007), hlm. 38.

Pariwisata di Sumatera Barat mempunyai harapan yang besar untuk dikembangkan, meskipun potensi yang dimiliki tidak sebesar potensi yang ada di Bali dan Yogyakarta. Keberadaannya diyakini mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat. Pariwisata yang ada di Sumatera Barat memiliki tiga aspek kekuatan, yaitu keindahan alam, budaya serta olahraga. Keindahan alam terlihat misalnya di Lembah Anai, Ngarai Sianok, Lembah Harau, beserta tiga buah danau yakni Danau Maninjau, Danau Kembar dan Danau Singkarak semakin melengkapi indahnya pemandangan alam Sumatera Barat. Wilayah di pesisir pantai juga tak kalah menariknya, Pantai Padang sampai ke pelabuhan Teluk Bayur serta Pantai Carocok selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal dan mancanegara pada event-event tertentu. Kepulauan Mentawai juga tersohor ke seluruh dunia, kawasan ini dikelilingi oleh hutan bakau, perairannya masih jernih dan bersih serta berpasir putih. Posisi Mentawai yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia membuat Mentawai menjadi surganya para peselancar dunia.

Kekayaan budaya Minangkabau serta keunikan budaya tatto yang ada di Mentawai semakin menambah potensi wisata yang ada di Sumatera Barat. Keunikan budaya tersebut memang tidak ada duanya di Indonesia. Pemerintah daerah pun sedang gencar-gencarnya mengadakan event-event olahraga dan festival budaya. Setiap tahunnya hampir di seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat mengadakan event dan festival tersebut untuk menarik wisatawan berkunjung ke Sumatera Barat. Event dan festival tersebut di antaranya, lomba balap sepeda berskala Internasional Tour De Singkarak yang diadakan dari

tahun 2009 sampai sekarang. Lomba Perahu Naga di Padang, festival Langkisau di Painan dan festival-festival lainnya.¹⁶

Menurut laporan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, arus kunjungan wisata ke Sumatera Barat setiap tahunnya terjadi peningkatan, baik kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Tahun 2005 wisatawan lokal yang berkunjung ke Sumatera Barat tercatat sebanyak 4.272.382 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 84.646 orang. Tahun berikutnya pun terjadi peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009, di mana pada tahun tersebut wisatawan lokal yang berkunjung ke Sumatera Barat mencapai 7.065.990 orang dan wisatawan mancanegara mencapai 151.054 orang.¹⁷ Pada tabel I dikemukakan data tentang wisatawan yang berkunjung ke Sumbar, baik wisatawan yang berasal dari lokal maupun dari mancanegara. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya, dari tahun 2005 sampai 2009 kunjungan wisatawan ke Sumbar mengalami peningkatan.

Tabel 1

Kunjungan Wisata ke Sumatera Barat Dari Tahun 2005-2009

No	Tahun	Wisatawan Lokal	Wisatawan Mancanegara
1.	2005	4.272.382 orang	84.646 orang
2.	2006	4.526.937 orang	88.923 orang
3.	2007	4.843.822 orang	93.369 orang
4.	2008	6.729.514 orang	131.123 orang
5.	2009	7.065.990 orang	151.054 orang

Sumber : Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat.

¹⁶ *Kalender Wisata Sumatera Barat tahun 2009* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat).

¹⁷ *Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat; Tentang Kunjungan Wisata ke Sumatera Barat tanggal 02 September 2010.*

Potensi wisata Sumatera Barat yang merupakan perpaduan antara keindahan alam dengan keunikan budaya ternyata belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta infrastruktur yang belum lengkap membuat daerah ini belum menjadi daerah tujuan utama para wisatawan. Hal ini juga berakibat pada lambatnya perkembangan industri pariwisata yang ada di daerah ini.

Kondisi infrastuktur jalan di Sumatera Barat memang belum terbilang bagus, meskipun saat ini Sumbar didukung oleh 1.153,94 kilometer yang berstatus jalan provinsi dan status nasional sepanjang 1.212,89 kilometer. Sementara jembatan berstatus nasional sepanjang 13.840 kilometer dan 7.265 kilometer berstatus provinsi tapi persentase menyebutkan bahwa 28,9 persen kondisi jalan provinsi saat ini berada dalam kondisi tidak bagus. Kondisi jembatan yang ada di Sumbar saat ini 20,8 persen berada dalam kondisi tidak bagus.¹⁸ Perbaikan infrastruktur jalan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mempercepat pembangunan daerah dan juga merupakan upaya yang sangat strategis untuk memajukan perekonomian di Sumatera Barat. Infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penunjang dalam kemajuan pariwisata.

Perantau juga mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Sumatera Barat. Kepiawaian mereka dalam aktivitas ekonomi mampu melahirkan pengusaha-pengusaha besar baik di tingkat lokal maupun nasional. Peranan pengusaha-pengusaha tersebut semakin berarti ketika mereka

¹⁸ Jalan di Sumbar Mulai Tidak Bagus (www.pesisirselatan.go.id/07 April 2010), diunduh dari (www.pesisirselatan.go.id), tanggal 13 Juli 2011.

membentuk jaringan yang solid sebagai sebuah kekuatan untuk membangun daerah. Jaringan usaha untuk bisnis tersebut perlu dibentuk untuk menghadapi kompleksnya persoalan ekonomi yang terjadi sekarang dan dapat merumuskan solusi serta mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian masyarakat.¹⁹

Gebu Minang merupakan salah satu institusi rantau yang cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan di Sumatera Barat. Meskipun ide pendirian institusi ini berasal dari Presiden Soeharto, yang menyarankan para perantau menyisihkan uang sebesar Rp1000 per bulan untuk pembangunan kampung halaman.²⁰ Selain Gebu Minang, institusi-institusi rantau didirikan berdasarkan nagari dan wilayah teritorial yang ada di Sumatera Barat seperti PKDP (Persatuan Keluarga Daerah Pariaman) dan SAS (Sulit Air Sepakat). Banyaknya pembangunan nagari dan pedesaan yang dirancang dan didanai dari rantau memperlihatkan bahwa hubungan perantau dengan kampung halamannya tidak terputus oleh jarak dan administrasi pemerintahan.

Berlakunya sistem otonomi daerah memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan daerah-daerah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Barat. Otonomi daerah secara singkat dapat diartikan sebagai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah seperti yang termaktub dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²¹ Diterapkannya sistem otonomi daerah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan daerah, hal ini dikarenakan pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab

¹⁹Saudagar Minang Harus Memperkuat Networking (www.riaumandiri.us/23 Oktober 2007), diunduh dari (www.riaumandiri.us), tanggal 13 Juli 2011.

²⁰Israr Iskandar, *op. cit.*, hlm. 31.

²¹J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

dalam mengatur daerahnya dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut. Dalam prakteknya ternyata otonomi daerah justru melahirkan raja-raja kecil di daerah. Kurangnya pengawasan serta penyalahgunaan wewenang membuat peluang untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah semakin besar. Kasus korupsi dalam penggelembungan APBD tahun 2002 yang dilakukan secara terang-terangan oleh anggota DPRD Tk.I Sumatera Barat memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan anggaran belanja daerah.²² Anggaran belanja daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk memperkaya diri sendiri.

B. Kondisi Politik Sumatera Barat Pada Era Reformasi

Lengsernya Soeharto serta tumbangnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun mengantarkan babak baru perpolitikan di Indonesia. Terjadinya euforia reformasi seperti kebebasan berpendapat tanpa takut diintimidasi oleh pihak tertentu serta adanya kebebasan pers menandai Indonesia telah memasuki era reformasi pada waktu itu. Euforia politik ditandai dengan diadakannya pemilu pada tahun 1999 yang merupakan transisi politik dari masa Orde Baru ke Reformasi, pada Pemilu 1999 Indonesia menerapkan sistem multi partai. Dari 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999.²³

²² Hary Efendi, "Korupsi Berjamaah Di Ranah Bagonjong", dalam Herwandi & Zaiyardam Zubir, ed, *Menggugat M inangkabau* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 157-158.

²³ Pemilu 1999 (www.kpu.go.id), *diunduh* dari (www.kpu.go.id), tanggal 28 Mei 2011.

Kondisi yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Pembentukan partai-partai baru hingga ke pelosok daerah serta munculnya politisi-politisi baru yang merupakan kaum reformis dan aktor di belakang gerakan reformasi di Sumatera Barat menandakan bahwa reformasi bergema ke seluruh penjuru negeri. Dari sekian banyak partai-partai baru, ada beberapa partai yang mencoba menarik simpati masyarakat Sumatera Barat. Partai tersebut di antaranya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Islam Indonesia Masyumi (PIIM). Kedua partai ini mengklaim bahwa mereka merupakan penerus dari cita-cita perjuangan Masyumi. Selain itu, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang secara terbuka menyatakan diri sebagai wadah politik kaum Muhammadiyah.²⁴

Hasil Pemilu 1999 di Sumatera Barat jauh berbeda dengan hasil pemilu-pemilu sebelumnya. Partai Golkar masih tetap mendominasi di sebagian besar daerah di Sumatera Barat, namun Golkar hanya menang tipis dari Partai Amanat Nasional. Hal itu bisa dilihat dari perolehan kursi yang didapatkan di DPRD Sumatera Barat, di mana Golkar memperoleh 12 kursi hanya unggul satu kursi dari Partai Amanat Nasional yang mendapatkan 11 kursi.²⁵ Keberhasilan PAN menduduki peringkat kedua dalam perolehan suara tidak lepas dari dukungan warga Muhammadiyah, di mana Sumatera Barat dari dulu dikenal sebagai basis Muhammadiyah. Ditambah lagi partai ini pada tingkat nasional dipimpin oleh seorang tokoh reformis, Amien Rais, yang dikenal sebagai tokoh yang sering menentang kebijakan-kebijakan Orde Baru dan selalu menyuarakan reformasi.

²⁴ Syamsudin Haris, "Dinamika Politik DPRD Sumatera Barat : Ketika Kekecewaan Rakyat Menggumpal", dalam Moch. Nurhasim, ed, *Kualitas Keterwakilan Legislatif* (Jakarta : PPW LIPI, 2001), hlm. 94.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

Menariknya, Partai Bulan Bintang yang mengklaim sebagai penerus perjuangan Partai Masyumi tidak mampu mengungguli suara Golkar. Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai Islam yang relatif lama mampu mempertahankan perolehan kursinya walaupun mengalami penurunan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Di sisi lain partai PDI-Perjuangan yang dinahkodai oleh Megawati Sukarno Putri mampu memperoleh lima kursi di DPRD Sumbar. Hal ini tentunya sangat mengejutkan dan merupakan prestasi yang luar biasa karena prestasi ini tidak pernah dicapai oleh partai-partai nasionalis sejak Pemilu 1955 sampai pemilu-pemilu pada masa Orde Baru²⁶. (selengkapnya lihat tabel 2).

Tabel 2

Hasil Pemilu 1999 SUMBAR

Berdasarkan Perolehan Kursi di DPRD SUMBAR

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	464.729	12
2	Partai Amanat Nasional	423.315	11
3	Partai Persatuan Pembangunan	402.359	10
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	213.749	5
5	Partai Bulan Bintang	115.928	3
6	Partai Keadilan	58.375	2
7	Partai Islam Indonesia Masyumi	34.556	1
8	Partai Keadilan Persatuan	22.829	1
9	PUI	21.184	1
10	KAMI	20.868	1
11	Partai Kebangkitan Bangsa	17.553	1
12	Partai Persatuan	16.925	1
13	TNI/Polri	-	6

Sumber: Pemilihan Umum 1999 Dalam Angka, Ditsospol Sumbar

²⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

Sekalipun pada Pemilu 1999 Golkar berhasil diimbangi partai-partai baru tapi hal itu tidak membawa perubahan yang cukup berarti di dalam susunan elit lokal maupun peta politik di Sumbar. Elit lama masih tetap menguasai kursi-kursi di DPRD Sumbar dan tentunya proses reformasi yang diharapkan lebih baik dari masa sebelumnya tetap mengalami stagnasi karena yang muncul justru tetap dengan kekuatan-kekuatan yang lama tetapi tampil dengan wajah yang baru.²⁷ Kekuatan-kekuatan lama tersebut tetap berusaha untuk mempertahankan dominasi mereka di kancah politik maupun ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut agenda perubahan yang didengungkan selama reformasi kecil harapannya untuk bisa diwujudkan.

Kondisi itu juga membawa implikasi politik signifikan di daerah pada awal reformasi, terbukti pada pemilihan Gubernur Sumbar pada tahun 2000, Zainal Bakar seorang birokrat senior dan tokoh Golkar yang telah lama malang melintang di masa Orde Baru terpilih sebagai Gubernur Sumbar periode 2000-2005. Zainal Bakar yang dikenal konservatif dan sangat menguasai jaringan birokrasi mampu mengungguli Saleh Khalid, tokoh PPP yang didukung oleh koalisi partai Islam. Kemenangan Zainal Bakar pada pemilihan tersebut ditengarai berbau suap, ditambah lagi dengan kursi-kursi di DPRD masih banyak diduduki elit lama yang tentu saja ingin mempertahankan "status quo" di pentas politik lokal.²⁸

Reformasi yang diharapkan mampu membawa angin segar dalam kehidupan masyarakat justru yang terjadi sebaliknya, politisi-politisi yang telah

²⁷ Pendapat Vedi R. Hadiz dikutip oleh Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah Dan Modal Asing. Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang Dari PT Semen Gresik Tbk 1999-2003* (Jakarta: SAD Satria Bakti, 2007), hlm. 33.

²⁸ Israr, Iskandar, *op. cit.*, hlm. 34-35.

mendapatkan tempat strategis baik di pemerintahan maupun di DPRD malah semakin melukai hati rakyat. 55 orang anggota DPRD yang terpilih pada Pemilu 1999 pada awalnya tetap berjalan bersama rakyat demi mewujudkan cita-cita reformasi, namun seiring berjalannya waktu amanah yang diamanatkan rakyat kepada anggota DPRD tersebut sirna. Selama lima tahun menjabat, produk-produk yang dihasilkan oleh anggota DPRD Sumbar tidak ada yang terbilang istimewa, apalagi untuk memenuhi harapan rakyat yang telah memilih mereka.²⁹

Perda-perda yang dihasilkan pun sering tidak pernah menyentuh atau tidak mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat, bahkan terkesan perda tersebut dipaksakan dan manghambur-hamburkan anggaran. Kekecewaan masyarakat sumbar semakin menjadi-jadi ketika naiknya gaji dan pendapatan anggota DPRD yang disetujui oleh DPRD pada APBD Sumbar tahun 2000. Hal itu semakin diperparah dengan adanya "kongkalingkong" antara DPRD dengan Pemda dalam rangka memuluskan implementasi kebijakan otonomi daerah dan pengucuran dana perimbangan antara pusat dengan daerah saat pembahasan anggaran untuk tahun 2001.³⁰ Kondisi ini tentu semakin menyakiti hati masyarakat Sumbar di tengah kehidupan yang serba sulit dan masyarakat dituntut untuk berjuang sendiri dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu. Sementara itu wakil-wakil mereka di DPRD memikirkan bagaimana caranya untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Selain dinilai memperkaya diri sendiri, anggota DPRD juga sering melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya sama sekali, kegiatan tersebut berupa kunjungan ke luar negeri atau istilah yang lebih populernya studi banding. Dalam

²⁹ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 248.

³⁰ Syamsudin Haris, *op. cit.*, hlm. 110.

teorinya studi banding yang dilakukan tersebut memang bagus dan bermanfaat, namun pada kenyataannya hanya pemborosan dan menghabiskan uang negara. Rancangan kegiatan yang mereka bawa dari Sumbar terbukti sia-sia karena nyaris tidak berjalan sama sekali bahkan mereka pergi ke luar negeri untuk menjadi pelancong.³¹

Kritik masyarakat Sumbar terhadap anggota DPRD semakin mengkristal ketika mereka dengan kewenangan yang diatur oleh undang-undang terutama pasal 39 tentang kedudukan protokoler dan keuangan, diberi hak untuk menentukan budget dewan. Dengan berbagi trik dan rancangan belanja, mereka membuat anggaran untuk mempertebal uang saku mereka dan dengan berbagai alasan pula mereka membela apa yang telah melakukan, termasuk mengingkari PP. No. 110 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD.³² Dasar inilah yang kemudian digunakan oleh 53 orang anggota DPRD Sumbar, sehingga terjadi pembengkakan APBD Sumbar Tahun 2002 untuk kepentingan pribadi setiap anggota dewan.³³

Kenyataan tersebut memancing kemarahan masyarakat, gelombang protes pun bermunculan. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Padang yang dimotori oleh mahasiswa, aktivis LSM, kaum cendekiawan maupun intelektual kampus. Para demonstran membawa poster-poster serta spanduk serta tulisan-tulisan lain yang berisi kecaman dan kritikan terhadap anggota DPRD Sumbar. Di sisi lain Forum Peduli Masyarakat Sumatera Barat yang berisikan kaum-kaum intelektual Sumbar yang mempunyai latar belakang yang berbeda membawa kasus ini ke meja hijau. Melalui perjalanan yang panjang akhirnya 43 orang anggota DPRD Sumbar

³¹ Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 248-249.

³² *Ibid.*, hlm. 250.

³³ Hary Efendi, *op. cit.*, hlm. 157.

dinyatakan terpidana, meskipun pengajuan PK yang diajukan oleh anggota DPRD tersebut diterima dan pada akhirnya pada tahun 2008, keluar keputusan bahwa mereka dinyatakan tidak bersalah.

Pemilu 2004 mempunyai makna strategis bagi masa depan bangsa Indonesia karena merupakan momentum ujian bagi kelanjutan agenda demokratisasi.³⁴ Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni tahun 1999, 2000, 2001, 2002 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Amandemen UUD 1945 ini telah membuka peluang bagi ditatanya kembali sistem politik ke arah yang lebih demokratis dengan menjunjung supermasi hukum dan kedaulatan rakyat.³⁵

Pelaksanaan Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dalam Pemilu 2004 terdapat tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Dalam tahapan ini rakyat memilih partai politik atau wakil-wakil dari partai politik untuk duduk di DPR, DPRD, dan DPD. Sedangkan dalam tahapan kedua adalah pemilihan calon presiden beserta wakilnya pada tanggal 5 Juli 2004. Jika hasil suara pemenang dalam pemilu presiden tidak mencapai atau kurang dari 50%, barulah diadakan pemilu tahapan ketiga yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu putaran pertama.

Hasil akhir dari Pemilu 2004 tidak jauh dari prediksi para pengamat politik di Indonesia, Partai Golkar masih tampil sebagai pemenang. Golkar memenangi pemilihan suara pada dua puluh enam provinsi dengan persentase 21,58%. Yang

³⁴ Syamsudin Haris, *Pemilu 2004; Menggapai Indonesia Baru* (Jakarta : Penghantar Seri Diskusi Publik Propatria, 4 Februari 2004), hlm.1.

³⁵ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 55.

lebih mengejutkan dua partai baru dalam Pemilu 2004 mampu memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan persentase masing-masing 7,45% dan 7,34% (lihat tabel 3).³⁶ Begitu juga untuk Provinsi Sumatera Barat, Golkar masih tetap mendominasi dengan memperoleh kursi di DPRD Sumbar sebanyak 16 kursi, disusul oleh PAN dengan 10 kursi. Sementara partai Islam lainnya seperti PKS, PPP, PBB dan PBR hanya memperoleh kursi kurang dari 10 (lihat tabel 4).³⁷

Tabel 3
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004
Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI

Ranking Suara	Partai Politik	Perolehan Suara		Jml. Kursi DPR RI
		Jumlah	Persen	
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	52
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	13
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	12
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	1
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	2
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056	0,56	0
TOTAL		113.462.414	100	550

Sumber : *Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU*

³⁶ Laporan Hasil Pemilu Legislatif 2004 diunduh dari (www.kpu.go.id), tanggal 25 Juni 2011.

³⁷ Laporan Hasil Pemilu Legislatif Sumbar 2004 diunduh dari (www.kpu-sumbar.go.id), tanggal 25 Juni 2011.

yang cukup signifikan yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan persentase masing-masing 7,42% dan 7,34% (lihat tabel 3).³⁰ Begitu juga untuk Provinsi Sumatera Barat Golkar masih tetap mendominasi dengan memperoleh kursi di DPRD Sumbar sebanyak 16 kursi, disusul oleh PAN dengan 10 kursi. Sementara partai Islam lainnya seperti PKS, PPP, PBB dan PRI hanya memperoleh kursi kurang dari 10 (lihat tabel 4).³¹

Tabel 3
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004
Dan Jumlah Perolehan Kursi Partai di DPR RI

Ranking Suara	Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Kursi DPR RI
		Jumlah	Persentase	
1	Partai Golongan Karya	24.180.727	21,28	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.028.629	18,23	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.980.264	10,27	53
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.761	8,12	28
5	Partai Demokrat	8.422.222	7,42	27
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.322.020	7,34	42
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	22
8	Partai Bulan Bintang	5.070.487	4,45	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.008	2,41	13
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.224	2,13	12
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.322.220	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.624	1,16	2
14	Partai Nasional Bangsa dan Kebangkitan Masyarakat	1.220.422	1,08	1
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.120	0,92	0
16	Partai Nasional Indonesia Alternatif	923.120	0,81	1
17	Partai Persatuan Nabalatal Umatul Indonesia	802.610	0,70	0
18	Partai Pelopor	278.022	0,27	2
19	Partai Penguak Demokrasi Indonesia	222.811	0,22	1
20	Partai Merdeka	812.241	0,74	0
21	Partai Sarikat Indonesia	620.206	0,60	0
22	Partai Perjuangan Indonesia Baru	620.222	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	620.216	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	620.026	0,56	0
TOTAL		112.462.414	100	250

Sumber : Kementerian Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu KPU

³⁰ Laporan Hasil Pemilu Legislatif 2004 (diunduh dari www.kpu.go.id), tanggal 22 Juni 2011.
³¹ Laporan Hasil Pemilu Legislatif Sumbar 2004 (diunduh dari www.kpu-sumbar.go.id), tanggal 22 Juni 2011.

Tabel 4
Hasil Pemilu 2004 SUMBAR
Berdasarkan Perolehan Kursi di DPRD SUMBAR

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Golongan Karya	16
2	Partai Amanat Nasional	10
3	Partai Keadilan Sejahtera	7
4	Partai Persatuan Pembangunan	7
5	Partai Bulan Bintang	5
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4
7	Partai Demokrat	3
8	Partai Bintang Reformasi	3
TOTAL		55

Diolah dari arsip Pemilu legislatif Sumbar 2004.

Kemenangan Golkar pada Pemilu 2004 di Sumatera Barat ataupun secara keseluruhan di Indonesia memang tidak lepas dari beberapa faktor. Menurut Rani Emilia, yang merupakan pengamat politik dari Universitas Andalas, kemenangan Golkar sudah diprediksi sebelumnya karena Golkar mampu menjaga massanya hingga ke pelosok daerah di Sumbar. Di samping itu, Golkar juga mempunyai hubungan yang kuat dengan birokrasi.³⁸ Rani juga menambahkan perolehan tujuh kursi yang didapatkan oleh PKS menandakan partai tersebut merupakan partai yang harus diperhitungkan karena kader-kader mereka yang militan dan rajin mengembangkan basis dan pengkaderan sampai ke pelosok-pelosok daerah.

Berkurangnya perolehan kursi PPP dan PAN di DPRD Sumbar walau tidak terlalu signifikan lebih diakibatkan pada strategi partai yang menempatkan caleg-caleg yang masih berstatus tersangka dan terdakwa dalam kasus "Korupsi Berjamaah Anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004". Rakyat Sumbar tentunya berharap kejadian tersebut tidak terjadi untuk kedua kalinya dan ketidakpercayaan

³⁸ Z. Chaniago, *Peta Politik Sumbar Tak Kan Berubah Dalam Pemilu 2004* ([www.rantau-net.com/09 februari 2004](http://www.rantau-net.com/09%20februari%202004)), diunduh dari, (www.rantau-net.com), tanggal 22 Juni 2011.

rakyat itu kemudian berdampak kepada berkurangnya perolehan suara PAN dan PKS jika dibandingkan dengan Pemilu 1999.³⁹

Setahun setelah pelaksanaan Pemilu 2004, masyarakat Sumatera Barat kembali disibukkan dengan agenda Pemilu. Bedanya kalau pada tahun 2004, pemilu dilaksanakan untuk memilih calon anggota DPR, DPRD dan DPD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, maka pada tahun 2005 masyarakat Sumatera Barat berkesempatan memilih secara langsung Kepala Daerah baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Tercatat ada 14 kabupaten dan kota yang akan mengadakan pemilihan secara langsung termasuk di antaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Pemilihan gubernur beserta wakilnya secara langsung dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005. Pemilihan tersebut diikuti oleh lima pasangan calon, yaitu Leonardy Harmaini – Rusdi Lubis yang diusung oleh Partai Golkar. Pasangan kedua adalah M. Kapitra Ampera – Dalimi Abdullah yang merupakan hasil koalisi antara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Partai Demokrat. Pasangan ketiga adalah Gamawan Fauzi – Marlis Rahman, dimana pasangan ini diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Berikutnya Irwan Prayitno – Iksama Hamid yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) dan yang terakhir adalah pasangan Jeffrie Geovanie – Dasman Lanin yang didukung oleh 16 partai politik yang tergabung ke dalam koalisi Sakato.⁴⁰

Dari kelima calon gubernur tersebut, hanya M. Kapitra Ampera dan Jeffrie Geovanie yang belum dikenal luas oleh masyarakat Sumatera Barat. M. Kapitra

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Muhamad Nasir, "Tak Hanya Sumbar, Semua Daerah Menunggu Pilkada Berkualitas" ([www.cimbuak.net/19 Juli 2005](http://www.cimbuak.net/19%20Juli%202005)), diunduh dari (www.cimbuak.net), tanggal 10 Juni 2011.

Ampera adalah seorang pengacara yang berdomisili di Pekanbaru, sedangkan Jeffrie merupakan pengusaha dan juga mantan Ketua Dewan Direksi The Amien Rais Center. Dari keseluruhan calon gubernur tersebut Jeffrie adalah calon yang memiliki sumber dana yang lebih baik dari calon-calon lainnya. Ditambah lagi, Jeffrie juga mempunyai manajemen kampanye yang lebih baik dan tertata rapi. Wajahnya yang tampan dan iklannya pada tiga stasiun televisi swasta nasional pada masa kampanye membuat popularitasnya semakin mengalami peningkatan.⁴¹

Tiga orang kandidat lainnya bukanlah wajah baru dalam kancah perpolitikan di Sumatera Barat. Calon dengan nomor urut satu, yakni Leonardi Harmainy dikenal sebagai Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2004-2009 dan juga Ketua Umum DPW Partai Golkar yang berlambang pohon beringin. Di samping itu, dia juga pernah menjadi Ketua Umum Gapensi untuk wilayah Sumatera Barat. Sedangkan Gamawan Fauzi, popularitasnya semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat ketika dia memperoleh Penghargaan Bung Hatta Award sewaktu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok. Nama yang terakhir adalah Irwan Prayitno, seorang pengusaha yang sangat berpengalaman di bidang pendidikan dan juga merupakan anggota DPR-RI periode 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Setelah melewati masa kampanye selama 14 hari dan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005. Pasangan Gamawan – Marlis tampil sebagai pemenang dalam pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Pasangan ini memperoleh suara yang cukup signifikan, bahkan dapat dikatakan menang mutlak daripada pasangan lainnya. Pasangan

⁴¹ *Bila Orang Minang Memilih*, Media Indonesia 28 Juni 2005.

Gamawan – Marlis unggul di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan mampu meraup suara sebanyak 757.254 dengan persentase sebanyak 41,51%. Di urutan kedua pasangan Irwan – Ikasuma memperoleh suara sebanyak 446.996 dengan persentase sebanyak 24,49%. Kemudian disusul oleh pasangan Jeffrie – Dasman yang didukung oleh Koalisi Sakato yang memperoleh suara 292.931 dengan persentase 16,06% . Pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, yakni Leonardy – Rusdi hanya mampu bercokol di urutan keempat dengan mendapat suara sebanyak 187.457. Urutan buncit diduduki oleh pasangan Kapitra – Dalimi dengan total perolehan suara sebanyak 139.850.⁴² (lihat tabel 5)

Tabel 5
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Dalam Pilkada 2005

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Gamawan-Marlis	757.254	41,51%.
2	Irwan-Ikasuma	446.996	24,49%
3.	Jeffrie-Dasman	292.931	16,06%
4.	Leonardy-Rusdi	187.457	10,27%
5.	Kapitra-Dalimi	139.850	7,67%

Sumber : diolah dari hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2005

Kemenangan Gamawan – Marlis tidak lepas dari beberapa faktor, di antaranya adalah figur Gamawan yang dinilai sukses dalam mengelola pemerintahan yang bersih sewaktu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok. Atas keberhasilannya itu, Gamawan memperoleh Penghargaan Bung Hatta Award pada tahun 2004. Modal politik yang dimilkinya berupa pencitraan diri yang telah terbangun sejak menjadi Bupati Solok mampu menarik simpati dari masyarakat

⁴² *Laporan KPUD Sumbar Hasil Pilkada Gubernur tahun 2005.*

Sumatera Barat. *Image* itu pula yang kemudian mampu merangkul kalangan akademisi dan kalangan-kalangan lain untuk menjadi bagian dari tim suksesnya.⁴³

C. Pengusaha Dalam Dunia Politik di Sumatera Barat

Setelah tumbangunya Rezim Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami perubahan penting. Melalui UU No. 2 Tahun 1999 Indonesia mulai menerapkan sistem multi partai yang memberi ruang bagi munculnya beragam partai politik di Indonesia. Jika sebelumnya ada tiga partai politik; Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan satu Golongan Karya, maka dalam Pemilu 1999 setidaknya terdapat 48 partai politik, dari 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Pada pemilu yang diadakan pada tahun 2004 partai peserta pemilu berkurang menjadi 24 partai politik. Kemudian pada pemilu berikutnya tahun 2009 menjadi 38 partai politik nasional dan ditambah 6 partai politik lokal yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).⁴⁴

⁴³Endang S. Soesilowati, *Bisnis dan Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada* (Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2007), hlm. 64.

⁴⁴Partai Politik Peserta Pemilu 2009, *diunduh* dari (www.kpu.go.id), tanggal 28 Mei 2011. Adapun keempat puluh partai politik tersebut, yaitu; Partai Hanura, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republik Nusantara, Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Enam partai lokal Aceh antara lain; Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Keterbukaan politik pasca Orde Baru ternyata juga memberikan peluang yang semakin besar bagi para pengusaha untuk berpolitik. Kalau pada masa Orde Baru itu, rakyat tidak diberi kebebasan menentukan hak politiknya, maka pada masa reformasi hak politik itu mendapat jaminan yang tegas oleh negara. Djonimar Boer, seorang pengusaha di Padang menuturkan bahwa sejak dulu ia ditawari masuk dalam Golongan Karya (Golkar), akan tetapi karena sesuatu alasan menolak tawaran itu, karena Golkar bukanlah partai yang sesuai dengan ideologinya. Lebih lanjut ia menyatakan :

“Saya sejak dulu ditawari masuk Golkar. Tapi saya tidak ingin masuk Golkar. Saya ingin masuk partai yang memperjuangkan syariat Islam. Waktu itu belum ada partai yang secara tegas memperjuangkan syariat Islam. Jadi ketika reformasi, banyak partai politik berdiri. Ada satu partai yang saya tertarik, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). Partai ini merupakan kelanjutan dari cita-cita Masyumi. Dulu ayah saya orang Masyumi. Karena itu saya putuskan untuk bergabung dalam partai ini.”⁴⁵

Lain pula halnya yang dilakukan oleh Suwirven Suwir, seorang politisi yang berasal dari Partai Demokrat Sumatera Barat. Sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang bangunan, memilih masuk dalam partai politik karena ingin mengembangkan usahanya. Dengan masuk ke dalam partai politik, akan mengembangkan jaringan dan relasinya ke para pejabat pemerintahan dan para kontraktor. Dengan jaringan dan relasi kekuasaan itu diharapkan nantinya akan mendapatkan order pekerjaan (proyek).

“,,, secara langsung tidak ada keuntungannya. Tapi keuntungan kalau kita pengusaha bergelut di partai, kawan-kawan secara otomatis banyak bertambah. Pejabat-pejabat pun akan banyak dikenal, dan ini akan memperkuat relasi,,, semakin banyak kawan kan semakin rancak. Misalno akan kenal dengan kontraktor, kalau ada proyek, bila ia

⁴⁵Wawancara dengan Djonimar Boer, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2010 di Padang.

butuh bahan, bisa kita masukan, atau beliau sendiri butuh material bisa hubungi kita.”⁴⁶

Kuatnya dominasi Golkar pada masa Orde Baru dalam menguasai pemerintahan dan dunia usaha memang tidak bisa dibantah lagi. Kenyataan sosial-politik inilah yang menyebabkan partai ini menjadi partai penguasa selama lebih kurang 30 tahun. Saharman Zanhar seorang politisi partai Golkar mengakui bahwa kekuatan Golkar membangun jaringan kekuasaan Orde Baru begitu rapi dan sistemik. Dengan menguasai jaringan kekuasaan dan dunia usaha, memberi manfaat yang besar terhadap partai untuk bergerak secara leluasa.⁴⁷ Salah satunya adalah menguasai kalangan generasi muda. Dengan beragam organisasi kepemudaan, Golkar membangun kekuatan kadernya. Bahkan Zamhar sendiri tidak sadar bahwa ia telah bergerak dari seorang wartawan menjadi seorang pengusaha. Hal ini terjadi karena banyak berkenalan dengan para politisi Golkar yang pada umumnya menguasai dunia usaha di Sumatera barat.

Proyek-proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik merupakan bagian penting dalam dunia pengusaha di Sumatera Barat. Untuk mendapatkan peluang besar terhadap proyek-proyek pembangunan itu, maka cara yang tepat adalah membangun hubungan baik dan koneksi dengan pihak-pihak yang menjadi kelompok inti dalam pekerjaan itu. Hubungan baik dan koneksi menjadi faktor yang menentukan seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan itu.

“... modal pergaulan dan hubungan baik dengan banyak pihak adalah hal yang penting dalam mendapatkan pekerjaan. Memiliki hubungan

⁴⁶ Wawancara dengan Suwirven Suwir, Anggota DPRD Sumbar Periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, tanggal 15 Juni 2010 di Padang.

⁴⁷ Wawancara dengan Saharman Zanhar, Politisi Partai Golongan Karya propinsi Sumatera barat, tanggal 20 Juli 2010 di Padang.

baik dengan pihak panitia yang menawarkan pekerjaan merupakan unsur yang penting. Dan di masa Orde Baru, untuk mendapatkan proyek itu seperti “arisan”. Orang tidak berebut-rebut mendapatkan pekerjaan seperti sekarang. Antar pengusaha saling berbagi pekerjaan dan informasi.”⁴⁸

Dari penuturan Saharman di atas terlihat bahwa untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah pada masa Orde Baru, para pengusaha saling berbagi. Jarang terjadi konflik antar pengusaha. Hal ini bisa saja terjadi karena pada masa itu konflik kepentingan politik antar pengusaha tidak muncul, karena berkemungkinan disebabkan hampir sebagian besar pengusaha tersebut berasal dari Partai Golkar, sehingga jalan yang tepat adalah diselesaikan dengan cara arisan saja. Bagi pihak yang belum mendapatkan pekerjaan maka akan mendapatkan giliran untuk mendapatkan pekerjaan pada masa-masa berikutnya. Jarang sekali proyek-proyek pemerintah pada masa Orde Baru dikerjakan oleh pengusaha lain ataupun pengusaha yang berada di luar struktur partai Golkar. Hal ini dungkapkan oleh Zaherman Bahren, anggota DPRD dari partai PPP pada masa Orde Baru :

“.....Kok tahu orang, bahaso wak manggaleh, ndak nyo bali gai jo orang pemda do. Indak buliah orang PPP tu akses do. Ambo harus manyuruak, waktu itu ambo pangkalan alat-alat bangunan jo agen semen sagalo macam tu...”⁴⁹

Kondisi tersebut tentu berbeda dengan masa setelah reformasi. Para pengusaha yang menumpuk sebelumnya bertumpuk di satu rumpun partai Golkar saja, kemudian dengan berubahnya sistem politik multi-partai maka para pengusaha pun akhirnya menyebar pada hampir semua partai politik. Pengusaha-

⁴⁸ Wawancara dengan Saharman Zanhar, Politisi Partai Golongan Karya propinsi Sumatera barat, tanggal 23 Juli 2010 di Padang.

⁴⁹ Wawancara dengan Zaherman Bahren, anggota DPRD Sumbar dari partai PPP periode 1982-1987, tanggal 08 Desember 2010.

pengusaha inilah yang lebih banyak mengisi jabatan-jabatan strategis di partai dan mereka juga menduduki sebagian kursi parlemen. Keberadaan mereka tentunya mempengaruhi relasi DPRD dengan pusat-pusat kekuasaan ekonomi dan politik. Pengusaha-kontraktor yang duduk di parlemen kemudian sangat proaktif dalam membangun komunikasi dan koneksi dengan sumber kekuasaan politik dan ekonomi lokal.⁵⁰

Jika dalam sebuah partai politik di daerah tidak banyak diisi oleh pengusaha maka partai tersebut akan mengalami kendala yang serius dalam memobilisir kekuatannya dalam meraih simpatik dan dukungan rakyat, seperti yang dituturkan oleh Djonimar Boer berikut ini :

“PBB adalah partai yang didirikan oleh anak-anak orang Masyumi. Dalam partai ini tidak banyak yang berlatar belakang pengusaha. Di Sumatera Barat yang masuk jadi pengurus PBB adalah mantan aktivis HMI. Rata-rata mereka bukan pengusaha, tetapi mantan akademisi, alim ulama, Aktivis LSM dan organisasi kepemudaan. Dan walaupun ada pengusaha, itu pengusaha yang kelasnya menengah ke bawah. Tidak banyak uangnya. Jumlahnya pun sangat tidak banyak. Jadi ketika melakukan kegiatan dan aktivitas partai kita memiliki keterbatasan dibandingkan dengan partai lainnya seperti Golkar, PDIP, Demokrat.”⁵¹

Terbatasnya pengusaha dalam sebuah partai politik, selain berpengaruh terhadap aktivitas dan aksi partai politik maka juga berpengaruh terhadap semakin kecilnya peluang-peluang pengurus partai untuk bermain di wilayah-wilayah proyek dan pekerjaan-pekerjaan fisik pembangunan yang bersumber dari dana pemerintahan. Partai-partai politik di daerah yang tidak memiliki pengurus dari latar belakang pengusaha biasanya tidak memiliki kepentingan yang kuat dan

⁵⁰ Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT. Semen Padang dari PT. Semen Gresik Tbk 1999-2003*, (Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 40.

⁵¹ Wawancara dengan Djonimar Boer, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2010 di Padang.

kemampuan untuk bermain-main di wilayah ini. Akibatnya tidak banyak keuntungan yang diperoleh secara finansial terhadap jabatannya sebagai anggota dewan, selain gaji dan berbagai tunjangan dan fasilitas yang didapatkan dari pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, partai politik yang memiliki keterbatasan modal politik sebagai akibat keterbatasan pengusaha yang bergabung didalamnya, maka kecenderungan aktivitas kepartaian tidak berjalan secara baik. Partai-partai ini hanya terlihat bergerak di saat-saat menjelang agenda pemilu mulai berjalan. Pembiayaan dan modal pemilu diperoleh dari hasil tabungan selama menjadi anggota dewan dan bahkan hasil dari pinjaman pihak tertentu, termasuk bank. Pentingnya peranan para pengusaha dalam menjalankan roda kepengurusan partai diungkapkan oleh Hidayat, yang merupakan fungsionaris PDI-P Sumbar dan Staf ahli PDI-P di DPRD Sumbar:⁵²

“.....Awalnya kita protes, soalnya sebagian dari pengusaha itu kita tahu persis sebelumnya berasal dari partai A. Namun, tidak bisa kita pungkiri partai ini butuh sumber daya, orang, figurnya, finansial, akses dari pengusaha tersebut. Atas dasar itulah, namun setelah tidak lagi berkuasa satu per satu hilang. Nah, dan kita amati lagi setelah masuk beberapa periode kepengurusan, cenderungnya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi dan itu memang mengharapkan akses kebijakan untuk mendapatkan proyek. Tidak hanya di PDI-P tapi juga di partai-partai lain”

Mahalnya ongkos pemilihan langsung membuat pengurus partai politik harus memutar otak untuk mencari sumber dana bagi keberlangsungan partai dan kampanye partai. Selain itu, tidak adanya rumusan yang jelas mengenai sumber dana kampanye mempermudah partai-partai politik untuk menyalahi rumusan tersebut. Dalam rumusan pasal 111 ayat (1) tentang sumber dana pemilu

⁵²Wawancara dengan Hidayat S.S, Fungsionaris PDI-P Sumbar dan Staf ahli PDI-P di DPRD Sumbar tanggal 21 Juli 2010.

menimbulkan pertanyaan dan persoalan yang begitu mendasar. Sinyalemen tersebut bisa dilihat ketika partai politik menjual “kursi jadi” kepada seseorang yang berminat duduk di lembaga legislatif, meskipun orang tersebut tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam partai tersebut. Ditambah lagi dengan tetap dipertahankannya sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2004 semakin mempermudah partai politik untuk memperjualbelikan “kursi”, di mana dari hasil tersebut partai politik memperoleh dana segar untuk membiayai kampanye.⁵³

Ketakutan akan terjadinya jual-beli kursi pada pemilihan langsung memang terjadi di beberapa daerah. Banyaknya caleg-caleg baru yang tidak jelas identitas, kemampuan bahkan ideologinya, namun memiliki modal yang cukup untuk bertarung dalam Pemilu mampu menyingkirkan orang-orang mempunyai kredibilitas dan integritas. Sistem pemilihan langsung ini juga menghilangkan substansi dari ungkapan “Suara Rakyat Suara Tuhan”, karena orang-orang yang memiliki modal besar tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus bangsa dan negara dapat duduk di parlemen. Kondisi ini tentunya semakin memperburuk negeri ini dan tentunya hubungan antara bisnis dengan politik semakin menggila.

“..... Justru itu, kecemasan saya pribadi adalah terjadinya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Kalau ini dibiarkan akan semakin mengerucut, apalagi sistem pemilu berdasarkan suara terbanyak. Dalam proses pemilu, caleg yang berasal dari kalangan pengusaha tidak begitu banyak yang masuk ke partai. Contohnya PDIP, caleg yang diusulkan tidak lengkap karena ketika penetapan caleg belum ada keputusan MK tentang caleg yang dapat duduk di legislatif adalah caleg dengan suara terbanyak. Pemilu 2014 yang saya takutkan adalah, orang-orang yang duduk di legislatif berasal dari juragan-juragan. Juragan jengkol, juragan kerbau, juragan getah, yang mempunyai akses langsung ke masyarakat dan juga juragan-juragan konstruksi termasuk juga mafia-mafia proyek, sebab konsekuensi pengalaman fenomena yang kemarin ini adalah ada duit ada suara, kecendrungan yang terjadi seperti itu dan hal itu tidak bisa dibantah.

⁵³ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi* (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 5.

Pengalaman saya mengikuti pemilu legislatif selama dua periode, minimal anda harus bawa buah tangan ke suatu daerah ketika kampanye. Kalau hanya menjual ideologi ketika kampanye, itu hanya omong kosong⁵⁴

Semakin besar arus pengusaha masuk ke dalam dunia politik, dalam arti melibatkan diri ke dalam partai politik maka semakin besar peluang kelompok ini menguasai di lembaga perwakilan rakyat daerah, mulai dari DPRD propinsi, kabupaten/kota. Semakin dominannya para pengusaha itu juga dipengaruhi oleh regulasi politik pemerintahan yang tidak membenarkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk terlibat dalam politik. Jika kita telusuri dari komposisi 55 anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2004-2009, maka hampir 75% berasal dari latar belakang pengusaha, baik sebagai kontraktor, konsultan, ataupun pedagang dan lain-lain.⁵⁵ Persentase yang berasal dari tokoh masyarakat seperti alim ulama, adat ataupun akademisi sangatlah terbatas. Dari 12 kursi DPRD Propinsi Sumatera Barat (2004-2009) yang diperebutkan dalam daerah pemilihan IV (Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Kota Pariaman dan Bukittinggi) 8 orang berlatar belakang pengusaha, dan hanya 4 orang saja yang tidak berasal dari pengusaha. 4 orang tersebut berlatar sebagai tokoh agama dan pendidik. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

⁵⁴ Wawancara dengan Hidayat S.S, Fungsionaris PDI-P Sumbar dan Staf ahli PDI-P di DPRD Sumbar tanggal 21 Juli 2010.

⁵⁵ Diolah dari *Laporan Hasil Pemilu 2004*, KPU Provinsi Sumatera Barat, tahun 2004.

Tabel 6
Pengusaha Dalam DPRD Sumbar 2004 – 2009
Daerah Pemilihan IV

No	Nama	Partai Politik	Keterangan
1	Leonardi Harmaini	Partai Golkar	Pengusaha
2	Drs. H. Usman Husen, MS	Partai Golkar	Alim Ulama
3	Tk. Mudo Ismet Ismail Koto Tuo	Partai Golkar	Alim Ulama
4	Drs. H. Guspari Gaus, MBA	PPP	Pengusaha
5	Masful	PPP	Wartawan
6	Taslim, S.Si	PAN	Pengusaha
7	Endarmy	PAN	Pengusaha
8	Rafdinal, SH	PKS	Pengusaha
9	Herizal Lazran Amirullah	PKS	Cerdik Pandai
10	Ir. H. Djonimar Boer	PBB	Pengusaha
11	Drs. Irawadi Uska	Demokrat	Pensiunan Bank BNI
12	Erwina Sikumbang	PDIP	Pengusaha

Sumber: *Laporan Hasil Pemilu 2004*, KPUD Propinsi Sumatera Barat, tahun 2004

Dominasi pengusaha tidak hanya terdapat pada lembaga perwakilan daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, akan tetapi juga dalam keanggotaan lembaga DPD-RI dan DPR-RI. Di lembaga DPD-RI pada periode 2004-2009 asal Sumatera Barat misalnya dari jumlah 4 anggota, tiga di antaranya adalah pengusaha (Irman Gusman, Zairin Kasim, dan Afdal) dan hanya 1 orang yang berasal dari cerdik pandai (Mochtar Naim). Bahkan komposisi ini mengalami perubahan pada pemilu berikutnya tahun 2009, keempat anggota DPD-RI periode 2009-2014 itu berasal dari pengusaha yaitu; Irman Gusman, Emma Yohanna, Riza Falepi dan Alirman Sori.⁵⁶

Kemenangan keempat legislator tersebut memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kekuatan finansial yang mereka miliki ditambah dengan faktor ketokohan mereka di Sumatera Barat. Eka Vidya Putra, pengamat

⁵⁶ Diolah dari *Laporan Hasil Pemilu 2009*, KPUD Provinsi Sumatera Barat, tahun 2009.

politik Sumatera Barat menambahkan kemenangan mereka juga dipengaruhi oleh modal yang lain yang mereka miliki. Di antaranya, adanya dukungan dari kekuatan partai politik dan yang *memback-up* mereka dan jaringan yang mereka miliki, seperti Riza Falepi yang diidentikan dengan PKS ataupun Emma Yohanna yang selama ini dikenal masyarakat sebagai bagian dari Golkar. Eka Vidya juga menambahkan bahwa kelebihan mereka dibanding dengan calon-calon lain yang juga berasal dari kalangan pengusaha adalah mereka mampu mengkolaborasikan modal kapital yang mereka miliki dengan modal sosial yang telah mereka bangun sebelumnya. Modal sosial tersebut berupa dukungan dari partai politik, di mana partai tersebut membutuhkan orang-orang seperti mereka karena memiliki kekuatan finansial walaupun mereka bukanlah kader partai yang berurat ke bawah.⁵⁷

Begitu pun pada lembaga DPR RI, dari 14 anggota DPR RI yang berasal dari pemilihan Sumatera Barat, sebagian besar bukanlah tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan akademisi, birokrasi ataupun militer. Dari 8 kursi DPR RI untuk wilayah pemilihan Sumatera Barat I, hanya 2 orang yang berlatar belakang birokrat yaitu Darizal Basir dan Dr. Zulmiar Yanri, P.hD, dan 6 lainnya adalah pengusaha. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini :

Tabel 7
Pengusaha Dalam DPR RI 2009 – 2014
Wilayah Pemilihan Sumbang I

No	Nama	Partai Politik	Keterangan
1	H. Dasrul Djabar	Demokrat	Pengusaha
2	Darizal Basir	Demokrat	Mantan Birokrat
3	Dr. Zulmiah Yanri	Demokrat	Mantan Birokrat

⁵⁷Wawancara dengan Eka Vidya Putra. M.si, pengamat politik Sumatera Barat yang juga merupakan Dosen FIS UNP tanggal 23 Juli 2011 di Padang.

4	Jeffrie Geovanie	Golkar	Pengusaha
5	Azwir Dainy Tara	Golkar	Pengusaha
6	M. Ichlas El Qudsi	PAN	Pengusaha
7	Prof. Dr. Irwan Prayitno	PKS	Praktisi Pendidikan
8	Epiyardi Asda	PPP	Pengusaha

Sumber: <http://www.kpu.go.id/> diunduh tanggal 7 November 2010

Selain di lembaga legislatif, dominasi pengusaha dalam ranah politik daerah juga terjadi di ajang-ajang pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 1999, Shaleh Khalid seorang pengusaha Minang di Jakarta menjadi saingan terberat Zainal Bakar untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat (1999-2004). Kemenangan Zainal Bakar hanya berselisih tiga suara; Zainal Bakar memperoleh 17 suara sedangkan Shaleh Khalid memperoleh 14 suara.⁵⁸

Begitupun ketika Pemilihan Gubernur tahun 2004. Gamawan Fauzi terpaksa bekerja ekstra keras menghadapi pesaing-pesaingnya terutama yang berasal dari pengusaha. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (2004-2009) dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ada 5 pasang calon yaitu, pasangan Gamawan Fauzi - Marlis Rahman, Irwan Prayitno – Ikasuma Hamid, Jeffrie Geofannie – Dasman Lanin, Leonardi Harmaini – Rusdi Lubis, dan Kapitra Ampera – Dalimi Abdullah. Empat kompetitor calon gubernur yang menjadi pesaing Gamawan tersebut semuanya adalah bergerak di dunia usaha dan tidak ada yang berasal dari pejabat pemerintahan (birokrat). Irwan adalah seorang pengusaha yang bergerak di sektor pendidikan. Begitupun dengan Jeffrie Geovanie dan Leonardi yang merupakan pengusaha yang terbilang sukses di Sumatera Barat.

⁵⁸ Israr Iskandar, *op.cit.*, hlm. 41.

Sebelum Pemilu 2004 dilaksanakan, Gamawan Fauzi waktu itu masih menjadi Bupati Kabupaten Solok. Ia tidak memiliki kendaraan (partai politik) yang akan mengantarkannya menjadi calon Gubernur Sumatera Barat. Setelah melakukan lobi kian-kemari, akhirnya Partai Bulan Bintang (PBB) bersedia mengusungnya untuk menjadi calon gubernur dengan tawaran Marlis Rahman, sebagai wakilnya.⁵⁹ Awalnya, keduanya disepakati sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Berhubung PBB hanya memperoleh satu kursi untuk bisa mengusung calon tersebut, maka PBB harus berkoalisi dengan partai lain. Setelah berusaha melakukan pendekatan dengan partai yang sangat dekat dengan *platform*-nya dan ternyata usaha yang dilakukan tersebut gagal, dikarenakan partai-partai tersebut sudah memiliki calon sendiri. PKS dan PBR mencalonkan Irwan Prayitno dengan Ikasuma Hamid, sementara PAN mengusung Jefri Geovannie. Melihat kondisi tersebut, satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah PDI-P, meskipun partai ini tidak se-ideologi dengan PBB.

Lobi tingkat tinggi pun dilakukan oleh PBB dengan elit PDI-P, setelah beberapa kali diadakan pertemuan antar kedua partai ini akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengusung calon yang diusung oleh PBB. Kesediaan PDI-P lebih diutamakan karena pada waktu itu mereka tidak memiliki calon, namun mereka memiliki suara dan jika digabungkan dengan suara PBB, maka bisa memenuhi syarat untuk mencalonkan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman. Negosiasi politik dagang sapi memang terjadi disini, dengan adanya perjanjian-perjanjian, jika calon yang diusung memenangkan pemilihan.⁶⁰ Sejarah kemudian mencatat bahwa pasangan yang dicalonkan oleh dua partai yang memiliki dua

⁵⁹Wawancara dengan Djonimar Boer, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Bulan Bintang Wilayah Sumatera Barat, tanggal 12 Juni 2010 di Padang.

⁶⁰Wawancara dengan Alex, Pengurus PDI-P Sumatera Barat.

ideologi berbeda ini kemudian menjadi pemenang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat.⁶¹

Kemenangan yang diperoleh Gamawan-Marlis membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha untuk memimpin di lembaga-lembaga eksekutif masih sangat rendah dibandingkan dengan seorang birokrat. Dalam ajang pilkada 2004-2005 hampir sebagian besar dimenangkan oleh calon yang berasal dari birokrat dan militer (TNI/Polri). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 8
Daftar Nama Bupati dan Walikota Yang Terpilih Dalam Pemilihan
Kepala Daerah
2004-2005

No	Pilkada	Pemenang	Keterangan
1	Padang Pariaman	Muslim Kasim	Birokrat
2	Solok	Gusmal	Birokrat
3	Pasaman	Syahiran	Birokrat
4	Pasaman Timur	Yusuf Lubis	Polri
5	Kota Solok	Syamsul Rahim	Birokrat
6	Tanah Datar	Shadiq Pasadigue	Birokrat
7	Bukittinggi	Djufri	Birokrat
8	Agam	Aristo Munandar	Birokrat
9	Padang Panjang	Syuir Syam	Birokrat
10	Dharmasraya	Marlon S	Pengusaha
11	Pesisir Selatan	Nasrul Abit	Birokrat
12	Lima Puluh Kota	Amri Darwis	Eks Profesional
13	Pariaman	Mukhlis Rahman	Birokrat
14	Sijunjung	Darius Apan	Purnawirawan TNI

Peluang keterpilihan pengusaha lebih besar pada lembaga legislatif dibandingkan pada lembaga eksekutif. Tingginya tingkat keterpilihan pengusaha di lembaga legislatif ini memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan finansial. Dengan sistem pemilihan langsung, apalagi dengan aturan suara

⁶¹ Lihat *Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat* (Padang: KPUD Propinsi Sumatera Barat), 2005.

terbanyak memberikan keuntungan tersendiri bagi para pengusaha. Dengan aturan suara terbanyak maka uang menjadi unsur yang menentukan seseorang calon legislatif terpilih atau tidak. Aturan ini bagi sebagian pihak akan mengenyampingkan kualitas intelektualitas para calon legislatif, dan mengutamakan kekuatan modal para calon.

“Jadi di dalam perkembangan politik akhir-akhir ini. Orang yang bisa berpolitik akhir-akhir ini adalah orang yang bisa melakukan suatu praktek-praktek yang barangkali bukan mulia, yaitu semua urusan politik dengan duit. Karena itulah mulai kini orang yang berduit kini jadi anggota DPR, tidak pandang kualitas⁶².”

Anggapan ini mendapat tanggapan dari Suwerven Suir anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat (2009-2014) yang berlatarbelakang pengusaha. Justru politisi pengusaha lah yang akan banyak berbuat untuk kepentingan rakyat, karena ia tidak lagi memikirkan kepentingan ekonomi pribadinya. Kondisi ekonominya yang mapan mempengaruhinya lebih maksimal berbuat untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

“.... Orang-orang itu (pengusaha) memiliki sumber dana yang cukup, jadi ketika mereka menjadi anggota dewan maka ia akan mengabdikan kepada rakyat. Mereka bisa memperhatikan nasib rakyat. Bisa mereka membantu rakyat, Bisa mereka menyumbang untuk konsituennya. Kalau anggota DPRD yang dulu, biasanya kikir kepada konsituennya, kalau pengusaha, gajinya habis untuk konsituennya. Berarti pengusaha memang untuk mengabdikan bukan untuk mencari makan. Lagi pula terdapat hubungan yang saling menguntungkan untuk rakyat yang memilih pengusaha untuk jadi wakilnya di DPRD⁶³.”

Selain itu, sistem pemilu dengan suara terbanyak selain menguntungkan para pengusaha juga secara langsung akan menguntungkan posisi pemilik usaha

⁶²Wawancara dengan Zamhar Baheram, Politisi PPP Sumatera Barat dan pernah menjadi Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 1982-1987, tanggal 20 Juli 2010 di Padang.

⁶³Wawancara dengan Suwirven Suwir, Anggota DPRD Sumbar periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, tanggal 15 Juni 2010 di Padang.

itu sendiri. Dalam situasi ini masyarakat sebagai pemilik suara semakin memiliki daya tawar yang kuat dan tinggi terhadap elite-elite politik yang sedang berpacu mencari kedudukan dan kekuasaan. Sebagian masyarakat, terutama yang memiliki jabatan di tingkat desa atau nagari untuk memanfaatkan agenda pemilu sebagai ajang mencari uang. Pada masa pemilu bermunculan pialang-pialang politik di tingkat masyarakat. Ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya seperti yang diakui sendiri oleh Saharman Zanhar berikut ini:

“Sekarang masyarakat sudah cerdas. Masyarakat sudah pintar memanfaatkan situasi. Ketika pemilu, muncul pialang-pialang politik. Ini ada yang berasal dari partai politik ada pula yang non partisan. Mereka ini jadi tim sukses. Situasi ini “dipagalehan” oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda di nagari. Ini bagian dari bentuk kemarahan rakyat terhadap para politisi dan pemimpin⁶⁴.”

Selain faktor sistem pemilihan, unsur lain yang ikut menentukan besarnya biaya politik dalam pemilu adalah ketokohan dan investasi sosial yang telah ditanam oleh seorang politisi terhadap masyarakatnya. Menurut Syukriadi Syukur seorang politisi Sumatera Barat asal PPP mengatakan bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang di lembaga legislatif. Faktor lain yang juga berperan penting dari terpilihnya seseorang adalah ketokohan dan investasi sosial yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam masyarakatnya.

“Dengan sistem pemilihan langsung, di mana suara terbanyak adalah yang menentukan, memang menimbulkan persaingan yang ketat antar caleg dalam satu partai, dan antar caleg dengan partai politik lainnya. Persaingan terbuka itu mendorong para caleg untuk menjadi yang terbaik sehingga mereka terpicu untuk mengeluarkan uang yang banyak. Tapi itu semua juga akan dipengaruhi oleh ketokohan dan

⁶⁴Wawancara dengan Saharman Zanhar, politisi Partai Golongan Karya propinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Juli 2010 di Padang.

investasi sosial yang telah ditanam oleh seorang caleg itu. Jika seseorang itu tidak kokoh dalam masyarakat dan belum banyak berbuat dalam masyarakat bisa jadi biaya yang dibutuhkan menjadi besar⁶⁵.”

Besar biaya politik itu memiliki pengaruh terhadap perilaku politik politisi. Bagi mereka yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan terhadap diri mereka, misalnya memperbesar biaya operasional pribadi anggota DPRD. Cara itulah yang memungkinkan untuk dilakukan, karena dalam proyek-proyek pemerintahan seorang anggota legislatif tidak diperbolehkan ikut terlibat. Aturan-aturan yang sangat ketat tidak memungkinkan seorang anggota legislatif untuk melakukan korupsi. Walaupun melakukan korupsi itu lebih cenderung dalam arti korupsi dalam pemikiran dan kebijakan.

“Sekarang susah anggota DPRD untuk korupsi. Sekarang aturan itu sudah semakin ketat. Sebagai wakil rakyat kita punya beban kerja untuk mengawasi pemerintah. mungkin yang ada hanya “korupsi pemikiran”. Artinya anggota dewan melakukan intervensi agar proyek itu diarahkan ke basis pemilihnya masing-masing. Dan itu kan tidak dilarang undang-undang. Atau mengawal agar ada sebuah pekerjaan proyek itu dikerjakan oleh perusahaan yang memiliki hubungan dengan anggota dewan yang bersangkutan. Sekarang aparat pemerintahan saja sudah takut untuk bermain-main dengan aturan”⁶⁶.

Lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, maka peluang untuk memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok secara langsung sangat terbatas. Hanya saja hal itu dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan daerah, salah satunya dengan

⁶⁵Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004, di Padang tanggal 4 Agustus 2010.

⁶⁶Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dari PPPP, di Padang tanggal 4 Agustus 2010.

menganggarkan dana aspirasi. Itupun tidak melalui anggota dewan, akan tetapi melalui sekretariat daerah⁶⁷.

Syukriadi Syukur menambahkan dengan diberlakukannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengisyaratkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur ke DPRD hanya sebatas keterangan saja, dibahas atau tidaknya LKPj Gubernur itu dalam satu bulan tetap dianggap sah. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang syarat dengan nuansa kepentingan. Sebelum Permendagri itu diterapkan, gubernur harus “mengamankan” anggota dewan dengan cara memberikan proyek-proyek pemerintah kepada anggota dewan. Tujuan pemberian proyek pemerintah tersebut adalah untuk “menutup mulut” anggota dewan terhadap LKPj Gubernur.⁶⁸

Nama Syukriadi Syukur pernah menjadi bahan pergunjungan masyarakat Sumbar. Selain menjadi salah seorang tersangka dalam kasus korupsi berjamaah anggota DPRD Sumbar 1999-2004, namanya mencuat ketika masyarakat Sumbar sedang gencar-gencarnya memperjuangkan *Spin-off* PT Semen Padang. Pada saat itu, banyak kalangan yang menilai Syukriadi beserta Afrizal telah memanfaatkan jabatan dan pengaruh politiknya untuk menjadi pengusaha batubara. Padahal, keduanya dikenal tidak memiliki pengalaman dalam menjalani bisnis tersebut. Fenomena keterlibatan keduanya dalam bisnis batubara dinilai oleh sejumlah kalangan merupakan politisi yang kemudian beralih menjadi pengusaha dengan memanfaatkan kekuatan dan pengaruh politik.

⁶⁷Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dari PPP, di Padang tanggal 4 Agustus 2010.

⁶⁸Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dari PPP, di Padang tanggal 4 Agustus 2010.

BAB IV

PROFIL POLITISI PENGUSAHA DI SUMATERA BARAT

A. Afrizal B.Ac, MBA

Nama Afrizal B.Ac, MBA muncul ke permukaan dan menjadi sorotan publik ketika dia menduduki jabatan sebagai Ketua Tim Terpadu *Spin-off* PT Semen Padang dari PT Semen Gresik. Banyak kalangan yang menilai pada waktu itu, Afrizal telah memanfaatkan kekuasaannya sebagai Ketua Tim Terpadu sekaligus Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumbar untuk mengeruk keuntungan pribadi dari perjuangan *Spin-off* tersebut. Afrizal sendiri merupakan politisi yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Untuk ukuran Sumatera Barat partai ini hanyalah sebuah partai kecil dan pada Pemilu 1999 partai ini hanya memperoleh satu kursi di DPRD Sumatera Barat.

Sewaktu menjadi Ketua Tim Terpadu *Spin-off*, Afrizal membangun hubungan dagang dengan Semen Padang (SP). Sangat disayangkan tentunya, hubungan tersebut terjadi ketika dia menjadi tokoh dan harapan masyarakat dalam memperjuangkan pemisahan Semen Padang dari Semen Gresik. Dalam hubungan bisnisnya dengan SP, Afrizal berperan sebagai pemasok batubara melalui perusahaan yang dimilikinya, PT Minang Malindo. Bisnis ini telah dilakukannya sejak Mei 2001 atau ketika perjuangan *Spin-off* sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh masyarakat Sumbar.¹ Sebagai seorang pengusaha, ia dapat dikatakan sebagai “pemain baru” di dalam bisnis

¹ Israr Iskandar, *Elit Lokal Pemerintah Dan Modal Asing, Kasus Gerakan Menuntut Spin-Off PT Semen Padang Dari PT Semen Gresik Tbk 1999-2003* (Jakarta: SAD Satria Bhakti, 2007), hlm. 103.

batubara. Selama ini, ia dikenal tidak memiliki *track record* dalam bisnis tersebut, baik sebagai penambang maupun penjual. Banyak kalangan yang menilai, ia memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Tim Terpadu untuk menjalin hubungan bisnis dengan SP.²

Keterlibatan Afrizal dalam bisnis batubara mengundang polemik di tengah-tengah masyarakat Sumbar. Betapa tidak, PT Minang Malindo yang dia nahkodai hanya dalam hitungan hari sudah bisa memasok batubara ke SP, tepatnya setelah ditanda tangannya perjanjian jual beli batubara dengan SP tanggal 8 Mei 2001. Sementara izin kuasa penambangan (KP) diperoleh dari Gubernur pada tanggal 4 Mei 2001.³ Fenomena tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya dan isu-isu negatif di tengah-tengah masyarakat Sumbar. Tidak hanya itu, keberadaan PT Minang Malindo pada saat itu juga menimbulkan kontroversi. Meski baru berusia 5 bulan, perusahaan ini telah melihatkan sepak terjangnya dalam bisnis hitam batubara. SK kuasa penambangan seluas 500 ha yang diperoleh dari Gubernur Sumbar untuk melakukan eksploitasi tambang dalam tidak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan tersebut. Dalam kenyataannya, PT Minang Malindo hanya menampung hasil tambang yang dilakukan oleh masyarakat atau lebih akrab dikenal dengan nama penambangan tanpa izin (PETI).⁴

Dalam sebuah wawancara, Afrizal mengatakan bahwa keterlibatan dirinya dalam bisnis batubara dilatar belakangi oleh kesengsaraan dan kerugian yang dialami

² *Ibid.*, hlm. 102-103.

³ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴ Zaiyardam Zubir dkk, "Seputar Kasus Mark Up PT Minang Malindo", *Laporan Hasil Penelitian* yang belum dipublikasikan, 2002.

rakyat Sawahlunto/Sijunjung karena keberadaan PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (BA UPO). Afrizal juga berpendapat, kesengsaraan dan kerugian masyarakat tersebut sebenarnya tidak mesti terjadi apabila PT BA UPO lebih peka dan peduli terhadap kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, apalagi PT BA UPO juga belum membayar sepeserpun ganti rugi tanah yang diklaim sebagai wilayah KP PT BA UPO itu. Lebih lanjut Afrizal menjelaskan bahwa keterlibatan dia dalam kegiatan ini jangan hanya dilihat dari kacamata bisnis saja, tapi juga harus dilihat dari kacamata sosial.⁵

Ia juga mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam bisnis batubara bukan untuk merugikan rakyat. Menurut Afrizal, keberadaan perusahaannya dalam bisnis batubara bukanlah dalam eksploitasi (penambangan), melainkan membantu rakyat dalam hal pengadaan alat-alat. Pelaku yang melakukan penambangan itu tetaplah rakyat yang mempunyai ulayat, akan tetapi Afrizal kemudian tidak mengatakan bahwa kegiatan utama dari perusahaannya adalah melakukan pembelian terhadap batubara tambang rakyat.

Mengenai tudingan bahwa PT MM telah melakukan “kongkalingkong”, mark up, dan menyuap gubernur dengan pihak-pihak lain, dibantah keras oleh Afrizal. Menurut dia, semua pihak mesti melihat dengan jernih dan objektif setiap persoalan yang terjadi pada waktu itu, bahwa keterlibatan PT MM dalam bisnis batubara memperlihatkan perusahaan ini berpihak kepada rakyat. Dia juga beranggapan apa

⁵ Wawancara dengan Afrizal, anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 dan Ketua Tim Terpadu *Spin-off*.

Terpanggilan.

² Kumpulan dengan Afrixi dan DPKD dengan 1999-2004 dan Kumpulan

menyebutkan bahwa ini adalah kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

dan ini adalah kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

kegiatan sosial.

ini adalah kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. PT MM telah melakukan "kontribusi" yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

yang telah dilakukannya pada saat itu dengan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut sangat tepat. Pertama, mendesak pemerintah untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pengusaha putra daerah untuk melakukan penambangan luar, sedangkan PT BA UPO diberikan wewenang untuk melakukan penambangan dalam. Jika PT BA UPO menyatakan tidak sanggup melakukan penambangan dalam, dia menyarankan agar PT BA UPO diusir ke luar Sumbar. “Kalau tak mau memberikan kontribusi nyata pada rakyat lebih baik berangkat dari Sumbar ini,” kata Afrizal.⁶

Dugaan mengenai KP yang dimiliki oleh PT MM hanya sebagai kedok untuk menampung hasil dari tambang rakyat lalu menjual dengan harga tinggi ke SP terdengar begitu nyaring pada saat itu. Pemberian KP oleh Gubernur juga patut dipertanyakan, karena wewenang pemberian KP hanya bisa dilakukan oleh bupati atau Dinas Pertambangan setempat. Ternyata gubernur memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan KP pada saat itu berhubung PT MM tersebut terletak di perbatasan antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Lokasi perusahaan berarti bersifat lintas kabupaten.⁷

Mengenai masalah tersebut, Afrizal berpendapat bahwa pemerintah pusat mesti kembali meninjau kedudukan UU No. 11 Tahun 1967 yang dianggapnya sentralistik. Pasalnya dalam pengurusan KP, dengan aturan yang ada, cenderung mengabaikan aspirasi daerah. Padahal mestinya dengan era otonomi daerah, UU itu mesti

⁶ Wawancara dengan Afrizal, anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 dan Ketua Tim Terpadu *Spin-off*.

⁷ Zaiyardam Zubir dkk, *op. cit.*

direformasi, apalagi di Sumbar telah kembali ke pemerintahan nagari berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2000, dalam pemerintahan nagari tanah ulayat sangat dihargai keberadaannya, tidak boleh dikapling-kapling seperti yang dilakukan oleh PT BA UPO.

Posisi Afrizal sebagai Direktur Utama di PT MM juga mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Di suatu waktu, ia tampil sebagai Dirut tapi di waktu lain, ia menjadi Komisaris perusahaan itu. Ketidakjelasan posisinya di PT MM menimbulkan rumor bahwa operasional PT MM ini melibatkan Gubernur Sumbar, H. Zainal Bakar. Apalagi ia dikenal dekat dengan Zainal Bakar pada waktu itu. Dalam posisi yang demikian, Afrizal sesungguhnya ibarat pion dari sebuah permainan. Artinya, Afrizal bukanlah seorang yang mampu untuk memodali PT MM itu sendiri. Di belakangnya ada Gubernur sebagai pemilik kekuasaan dan H. Nurli sebagai pemilik modal utama PT MM.⁸

Kondisi tersebut membuat posisi Afrizal sendiri membias dalam PT MM itu. Contohnya, pada kartu namanya, Afrizal merupakan direktur utama PT MM, namun ketika dengar pendapat yang digelar di DPRD Sumbar mengenai masalah tersebut, ia mengaku sebagai komisaris PT MM dan H Nurli sebagai direktur utamanya.⁹ PT MM digunakan untuk melakukan kontak bisnis dengan penambang rakyat. Pertambangan yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai pertambangan dalam bentuk baru di Sawahlunto Sijunjung. Persoalannya adalah KP yang dikeluarkan oleh gubernur pada

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

saat itu bukan untuk bisnis batu bara, KP hanya ditujukan untuk penambangan. PT MM melakukan sebaliknya yaitu tidak menambang tetapi memperdagangkan batu bara hasil tambang rakyat. Afrizal sendiri mengakui kalau PT MM tidak melakukan penambangan batu bara, melainkan hanya menerima hasil tambang rakyat. Akibatnya, banyak yang menilai, apa yang dilakukan Afrizal merupakan kesalahan fatal.

B. Drs. Syukriadi Syukur, M.Pd

Selain Afrizal, Syukriadi Syukur adalah salah seorang politisi yang beralih menjadi pengusaha pada masa reformasi. Apa yang dilakukan oleh Syukriadi Syukur tidak jauh berbeda dengan Afrizal, yakni memanfaatkan jabatan dan pengaruh politik untuk meraup keuntungan pribadi. Hanya saja, perbedaan yang mendasar di antara keduanya adalah pola permainan dalam memulai dan menjalankan bisnisnya. Kalau Afrizal memulai bisnis batubara ketika isu *Spin-off* sedang melanda Sumbar, berbeda dengan Syukriadi Syukur, ia memulai bisnis tersebut pada tahun 2003 atau di akhir-akhir masa jabatannya.¹⁰ Ketika ia memulai bisnis tersebut, isu *Spin-off* tidak lagi menjadi perhatian publik Sumbar dan pola permainan bisnisnya dapat dikatakan lebih “cantik” ketimbang Afrizal.¹¹

Syukriadi Syukur memulai karir politiknya pada Pemilu 1977. Saat itu, ia masih dianggap sebagai “anak bawang” dan bertugas untuk menempel poster serta

¹⁰ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

¹¹ Israr Iskandar, *op.cit.*, hlm. 106.

memasang atribut PPP. Barulah pada Pemilu 1982, ia “naik kelas” dari yang awalnya bertugas sebagai tukang tempel pamflet beralih menjadi juru kampanye PPP di tingkat kecamatan di Kota Padang. Pengalamannya sebagai juru kampanye pada Pemilu 1982 semakin menambah wawasan dan kemampuannya dalam bidang politik. Pada tahun 1985, ia kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPC PPP Kota Padang. Selain menjabat sebagai wakil ketua, ia juga menduduki jabatan penting lainnya, yakni Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumbar.

Bergabungnya Syukriadi Syukur ke dalam PPP memang tidak bisa dilepaskan dari faktor historis keluarganya. Dalam sebuah wawancara, Syukriadi Syukur mengatakan bahwa ia telah menikmati pendidikan politik sejak kecil. Ayahnya adalah seorang politisi Masyumi dan pernah juga menjadi Ketua Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1971 di Pekanbaru, Riau. Ketika PPP lahir pada masa Orde Baru, yang merupakan gabungan dari empat partai Islam, ayahnya berpesan kepadanya untuk selalu mendukung perjuangan partai tersebut.¹²

Setelah melewati beberapa kali pemilu, pada Pemilu 1987 PPP kemudian mencalonkan dirinya sebagai salah seorang calon anggota legislatif kota Padang dan hasil yang diperoleh sangat memuaskan, di mana Syukriadi Syukur berhasil menduduki kursi DPRD Kota Padang. Sampai pada Pemilu 1997, ia selalu berhasil menjadi salah seorang utusan PPP di DPRD Kota Padang. Barulah, pada Pemilu 1999 atau pemilu pertama pada masa reformasi, ia mencalonkan menjadi anggota DPRD Sumbar dari PPP wilayah pemilihan Tanah Datar. Pada tahun ini juga karir politiknya

¹² Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

di PPP melesat tajam, ia dipercaya menduduki jabatan Wakil Ketua DPW PPP Sumbar.

Hasil Pemilu 1999 mengantarkannya untuk duduk di DPRD Sumbar, bahkan kemudian ia dipercaya untuk menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumbar. Karir politiknya yang begitu cepat menanjak pada masa reformasi juga berimbas pada kegiatan dunia usahanya. Lembaga pendidikan yang bergerak pada bidang kursus Bahasa Inggris dan Akutansi, bernama FIES, yang didirikannya pada tahun 1979 semakin berkembang pada awal reformasi. Perkembangan lembaga tersebut cukup menjanjikan, buktinya pada tahun 1999 Syukriadi memperluas lembaga pendidikan tersebut dengan mendirikan PROSPEK (Program Siap Pakai Ke Lapangan Kerja). Program pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat Sumbar pada umumnya dan pemuda khususnya yang siap terjun ke dunia kerja.¹³

Jabatan sebagai Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumbar memudahkan Syukriadi membangun jaringan serta relasi dengan pejabat-pejabat penting yang ada di Sumbar. Dari modal kedekatannya dengan Gubernur Sumbar, Zainal Bakar dan sejumlah pejabat teras di lingkungan SP pada waktu itu, membuat Syukriadi mencoba mencari peruntungan yang lebih menjanjikan dalam bisnis batubara. Sama halnya dengan Afrizal, Syukriadi juga tidak memiliki pengalaman yang *mumpuni* dalam menjalankan bisnis batubara. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai politisi dan praktisi pendidikan. Syukriadi sendiri juga tidak menampik anggapan yang mengatakan bahwa dirinya memulai bisnis batubara bermodal dari kedekatan dengan pejabat-

¹³ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

pejabat yang ada di Sumbar. Hal ini dapat dilihat dari penggalan wawancara dengan Syukriadi sebagai berikut.

“kalau latar belakangnya, kenapa saya pindah dari pendidikan ke batu bara kan gitu? Karena, saya ini kan politisi... yang mempunyai banyak teman, rekan, konstituen, banyak rekan, teman dan konstituen saya yang punya lahan ulayat nya mengandung batu bara, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menggarapnya, mengolahnya, ataupun bahkan menjualnya karena tersangkut pula dengan perizinan-perizinan, untuk mengurus perizinan-perizinan itu kan membutuhkan keterampilan, kecerdasan, kemampuan finansial, untuk teknologinya. Sementara saya juga punya teman-teman yang punya kemampuan itu semuanya. Pada prinsipnya saya memadukan antara orang yang memiliki lahan batubara dengan orang yang punya duit dan teknologi, a.... ya kita padukan semuanya, kita bikin perusahaan. Tapi, pada dasarnya kita ini adalah pengusaha yang tak bermodal, maka kita hanya mempergunakan otak saja.....”¹⁴

Dari informasi tersebut terlihat bahwa yang melatarbelakangi Syukriadi untuk memulai bisnis batubara tersebut disebabkan karena adanya faktor kedekatan Syukriadi dengan pihak-pihak tertentu. Relasi tersebut telah ia bangun semenjak menjadi politisi dan puncaknya ketika ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumbar. Dari modal kedekatan itulah yang membuat Syukriadi yakin untuk memulai bisnis batubara dan kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang bernama CV. Ranah Tigo Luhak, yang bergerak sebagai *suplier* batubara ke SP waktu itu. Selain itu, Syukriadi juga mendirikan perusahaan CV Yukotira Prakarsa yang bergerak dalam penyediaan batu *krip* yang berfungsi menahan abrasi pantai.¹⁵ Keterlibatan Syukriadi dalam bisnis batubara dengan SP menimbulkan kecurigaan masyarakat.

¹⁴ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

¹⁵ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

Banyak yang menilai, Syukriadi telah memanfaatkan posisi politiknya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbisnis dengan SP.

Pendapat miring dari berbagai kalangan tersebut, kemudian disanggah oleh Syukriadi. Ia menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukannya dahulu itu telah sesuai dengan prosedur yang ada. Ia juga menambahkan, tidak ada salahnya apabila pejabat publik terjun ke dunia bisnis asalkan pejabat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tetap berjalan di koridor yang benar. Pendapat Syukriadi tersebut tergambar dari wawancara berikut ini.

“Kita kan masuknya kan sama aja. PT Semen Padang itu namanya kan, siapapun memasok batubara.., kan asal ada batubara kita, sesuai dengan kualitas yang mereka butuhkan, kita ajukan permohonan, kita ajukan permohonan...., mereka akan teliti ke lapangan, apakah batubara yang kita suplai ke PT Semen Padang itu memang adalah benar-benar sesuai dengan apa yang ada dengan isi permohonan kita, maka kalau sesuai mereka tentukan harga, kalau kita cocok harganya..mereka beli, kalau tidak cocok ya tidak dipakai. Kalau yang dikirim itu tidak sesuai dengan perjanjian kita, mereka tolak, kalau dikirim juga boleh tapi dipenalti atau dikurangi harga. Itu yang terjadi.”¹⁶

Bisnis batubara Syukriadi kemudian berkembang dengan pesat, walaupun pada Pemilu 2004 ia gagal menduduki kursi DPRD Sumbar. Kegagalan dalam pemilu tersebut tidak menjadi beban bagi dirinya karena ia telah disibukkan dengan rutinitas sebagai pengusaha batubara. Memasuki tahun 2008 bisnisnya mengalami kemunduran bahkan nyaris bangkrut. Kemunduran bisnis yang dialami oleh perusahaannya dianggap oleh sebagian kalangan, karena Syukriadi sudah tidak lagi mempunyai kedudukan yang kuat dalam dunia politik. Hal tersebut kemudian

¹⁶ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

dibantah oleh Syukriadi, kemunduran bisnis tersebut lebih diakibatkan ketidakmampuan perusahaannya untuk memenuhi spesifikasi batubara yang telah ditetapkan oleh SP dan rendahnya kualitas batubara yang disuplai oleh perusahaannya.¹⁷

Kondisi tersebut tidak membuat Syukriadi jera dalam menjalankan bisnis batubara. Akhir tahun 2008, ia kembali mencoba mencari peruntungan dalam bisnis tersebut. Dengan modal yang tidak terlalu besar dan berbekal jaringan bisnis serta politik yang dimilikinya, Syukriadi kembali menekuni bisnis batubara. Kemampuan dan ketekunannya dalam menjalankan bisnis batubara tidak perlu diragukan lagi. Buktinya, Syukriadi mampu menggandeng PT Trasindo Mineral, sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengeksplorasian batubara tambang dalam. Kuasa Penambangan (KP) yang dimiliki oleh Syukriadi yang didapatkannya dari Bupati Sijunjung, mempermudah ia melakukan kerjasama dengan perusahaan yang dimiliki oleh Cina keturunan itu.¹⁸ Perusahaan tersebut kemudian mengeksploitasi kawasan yang ditunjuk dalam KP yang dimiliki oleh Syukriadi.

Ketekunan dan relasi yang dimiliki oleh Syukriadi memang diakui oleh Azis Ramlan, salah seorang rekan bisnisnya. Azis yang mengenal Syukriadi sejak tahun 2007 mengatakan bahwa Syukriadi merupakan seorang yang ulet, tekun dan pekerja keras dalam menjalankan bisnis batubara. Azis juga menambahkan relasi yang dimiliki oleh Syukriadi semakin mempermudah dan memperlancar bisnisnya. Salah

¹⁷ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

¹⁸ Wawancara dengan Syukriadi Syukur, Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 1999-2004 dan 2009-2014 dari PPP, tanggal 5 Agustus 2011 di Padang.

satu buktinya adalah Syukriadi mendapatkan KP yang baru dari Bupati Sijunjung dan dinas pertambangan. KP baru yang diperolehnya kemudian menggantikan KP lama yang telah dimiliki sebelumnya.¹⁹ Azis sendiri bekerja dalam perusahaan yang dimiliki Syukriadi. Ia sehari-hari bertugas dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan legalitas pertambangan. Selain itu, azis merupakan pemilik ulayat tambang. Di atas tanah ulayat miliknya, Syukriadi memperoleh KP dan melakukan galian batubara tambang dalam melalui PT Trasindo Mineral.

Setelah gagal menduduki kursi DPRD pada Pemilu 2004, Syukriadi kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2009. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar III meliputi Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Dharmasraya. Dalam pemilu tersebut, ia mampu meraup suara sebanyak 4892²⁰ dan sekarang menjadi salah seorang anggota Komisi IV DPRD Sumbar, yang menangani masalah kesejahteraan rakyat.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Azis Ramlan, salah seorang rekan bisnis Syukriadi Syukur, tanggal 8 Agustus 2010.

²⁰ Merekalah Yang Duduk Di DPRD Sumbar ([iwanrakelta.wordpress.com/27 April 2009](http://iwanrakelta.wordpress.com/27-April-2009/)), diunduh dari (iwanrakelta.wordpress.com), tanggal 13 Oktober 2011.

²¹ Profil Anggota Komisi IV DPRD Sumbar ([www.sumbarprov.go.id/31 desember 2010](http://www.sumbarprov.go.id/31-desember-2010/)), diunduh dari (www.sumbarprov.go.id), tanggal 13 Oktober 2011.